WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

KODE KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan arsip dinamis, memfasilitasi penciptaan, akses, penggunaan, dan penyusutan arsip, perlu menetapkan klasifikasi arsip dengan menggunakan sistem pengkodean;

b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Serang, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 235);
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 53);

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa katagori unit informasi kearsipan.
3. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.
4. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip dinamis.
5. Arsip Dinamis adalah adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu wali kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.

BAB II

KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

a. sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Serang untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan Arsip Dinamis;
b. mewujudkan tertib Arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Serang; dan
c. menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali Arsip.

Pasal .....

Pasal 3

(1) Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Kota Serang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tugas dan fungsi Pencipta Arsip yang meliputi:

a. fungsi fasilitatif; dan

b. fungsi substantif.

(3) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Serang.

(4) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.

Pasal 4

(1) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka.

(2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali Arsip.

(3) Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 5

(1) Pembinaan atas penyelenggaraan Klasifikasi Arsip meliputi:

a. pelaksanaan pendampingan, sosialisasi, dan publikasi;

b. pelaksanaan pelatihan teknis kepada petugas kearsipan; dan

c. monitoring dan evaluasi.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

BAB .....

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Kearsipan Pemerintahan Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 10 November 2023

WALI KOTA SERANG,

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 10 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 NOMOR 339

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

KODE KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

000	UMUM			
	000.1	KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN		
		000.1.1	Telekomunikasi	
		000.1.2	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	
			000.1.2.1	Perjalanan dinas kepala daerah
			000.1.2.2	Perjalanan dinas DPRD
			000.1.2.3	Perjalanan dinas pegawai
		000.1.3	Perjalanan Dinas Luar Negeri	
			000.1.3.1	Perjalanan dinas kepala daerah
			000.1.3.2	Perjalanan dinas DPRD
			000.1.3.3	Perjalanan dinas pegawai
		000.1.4	Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas, dan Fasilitas Kantor lainnya)	
		000.1.5	Rapat Pimpinan antara lain: Notula/Risalah Rapat	
		000.1.6	Penyediaan Konsumsi	
		000.1.7	Pengurusan Kendaraan Dinas	
			000.1.7.1	Pengurusan surat-surat kendaraan dinas
			000.1.7.2	Pemeliharaan dan perbaikan
			000.1.7.3	Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan
		000.1.8	Pemeliharaan Gedung, Taman, dan Peralatan Kantor	
			000.1.8.1	Pertamanan/*landscape*
			000.1.8.2	Penghijauan

	000.1.8.3	Perbaikan gedung
	000.1.8.4	Perbaikan peralatan kantor
	000.1.8.5	Perbaikan rumah dinas/wisma
	000.1.8.6	Kebersihan gedung dan taman
000.1.9	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon, dan Komputer	
	000.1.9.1	Perbaikan/pemeliharaan
	000.1.9.2	Pemasangan
000.1.10	Ketertiban dan Keamanan	
	000.1.10.1	Pengamanan, penjagaan, dan pengawalan terhadap pejabat, kantor, dan rumah dinas
	000.1.10.2	Laporan ketertiban dan keamanan
000.1.11	Administrasi Pengelolaan Parkir	
000.1.12	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan, dan Pegawai lainnya	
000.2	PERLENGKAPAN	
000.2.1	Inventarisasi dan Penyimpanan	
	000.2.1.1	Data hasil inventarisasi dan penyimpanan
	000.2.2.2	Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan
000.2.2	Pemeliharaan Peralatan Kantor	
	000.2.2.1	Data hasil pemeliharaan kantor
	000.2.2.2	Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor
000.2.3	Distribusi	
	000.2.3.1	Barang habis pakai
	000.2.3.2	Barang milik daerah
000.2.4	Penghapusan Barang Milik Daerah antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya Proses Lelang Penghapusan	
000.2.5	Pengelolaan Data Base Barang Milik Daerah	

000.3 PENGADAAN

000.3.1 Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (antara lain: Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Barang/Jasa, Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran Pengadaan, Penetapan Kebijakan Umum, Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

000.3.2 Pengadaan Langsung antara lain: Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Penandatanganan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak

000.3.3 Pengadaan Tidak Langsung/Lelang antara lain: Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Penandatanganan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak

000.3.4 Swakelola (antara lain: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi)

000.3.5 Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan antara lain: Data Base Pengguna Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa, Data Base Kontrak, Data Base Pengadaan Barang/Jasa

000.3.6 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengadaan antara lain: Laporan Hasil Monitoring dan Laporan Hasil Evaluasi

000.4 PERPUSTAKAAN

000.4.1 Kebijakan di Bidang Perpustakaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

000.4.2 Deposit Bahan Pustaka

000.4.2.1 Serah simpan karya cetak dan karya rekam

000.4.2.2 Pangkalan data penerbit dan pengusaha rekaman

000.4.2.3 Terbitan internasional dan regional

000.4.2.4 Pemantauan wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam

000.4.2.5 Bibliografi dan katalog

000.4.3	Koleksi Pustaka	
	000.4.3.1	Pembelian
	000.4.3.2	Hibah
	000.4.3.3	Hadiah
	000.4.3.4	Tukar menukar
	000.4.3.5	Implementasi undang-undang KCKR
	000.4.3.6	Terbitan internal
	000.4.3.7	Pendistribusian bahan pustaka surplus
	000.4.3.8	Inventarisasi koleksi (buku induk)
000.4.4	Pengolahan Bahan Pustaka	
000.4.5	Pangkalan Data Katalog Koleksi	
000.4.6	Layanan Perpustakaan	
	000.4.6.1	Keanggotaan
	000.4.6.2	Peminjaman
	000.4.6.3	Pengembangan gemar baca
000.4.7	Kerja Sama Perpustakaan	
	000.4.7.1	MoU
	000.4.7.2	Perjanjian kerja sama
	000.4.7.3	Partisipasi organisasi profesi dan kerja sama internasional
000.4.8	Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan	
	000.4.8.1	Pengembangan situs web
	000.4.8.2	Pengembangan kemas ulang informasi multimedia
	000.4.8.3	Pengembangan program aplikasi perpustakaan
	000.4.8.4	Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital
000.4.9	Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	
000.4.10	Konservasi	
	000.4.10.1	Perawatan bahan perpustakaan
	000.4.10.2	Perbaikan bahan perpustakaan
	000.4.10.3	Penjilidan bahan perpustakaan

000.4.11	Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)	
000.4.12	Transformasi Digital	
000.4.13	Kurasi Digital	
000.4.14	Pengembangan Perpustakaan	
	000.4.14.1	Perpustakaan umum
	000.4.14.2	Perpustakaan khusus
	000.4.14.3	Perpustakaan sekolah
	000.4.14.4	Perpustakaan perguruan tinggi

000.5 KEARSIPAN

000.5.1	Kebijakan di Bidang Kearsipan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
000.5.2	Pembinaan Kearsipan	
	000.5.2.1	Pengembangan profesi arsiparis, antara lain: formasi jabatan arsiparis, analisis kebutuhan arsiparis
	000.5.2.2	Bimbingan konsultasi arsiparis
	000.5.2.3	Penilaian arsiparis
	000.5.2.4	Pemilihan arsiparis teladan, antara lain: berkas penyelenggaraan pemilihan arsiparis teladan, berkas penetapan arsiparis teladan
	000.5.2.5	Data base arsiparis
	000.5.2.6	Bimbingan konsultasi kearsipan
	000.5.2.7	Supervisi dan evaluasi, antara lain: perencaan supervisi dan evaluasi, pelaksanaan supervisi dan evaluasi, laporan hasil supervisi dan evaluasi
	000.5.2.8	Data base bimbingan dan konsultasi dan supervisi
	000.5.2.9	Fasilitasi kearsipan, antara lain: fasilitasi SDM kearsipan, fasilitasi prasarana dan sarana kearsipan

	000.5.2.10	Lembaga/unit kearsipan teladan, antara lain: berkas penyelenggaraan pemilihan lembaga/unit kearsipan, berkas penetapan lembaga/ unit kearsipan teladan
	000.5.2.11	Jadwal Retensi Arsip (JRA), antara lain: berkas usulan persetujuan JRA, surat persetujuan JRA dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
000.5.3	Pengelolaan Arsip Dinamis	
	000.5.3.1	Penciptaan (antara lain: buku registrasi naskah masuk dan keluar, buku agenda, kartu kendali, lembar pengantar/ buku ekspedisi)
	000.5.3.2	Pemberkasan arsip aktif (antara lain: daftar berkas dan daftar isi berkas)
	000.5.3.3	Penataan arsip inaktif (antara lain: daftar arsip inaktif, daftar arsip inaktif tematik)
	000.5.3.4	Penggunaan (antara lain: daftar arsip dinamis berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, bukti peminjaman arsip)
	000.5.3.5	Autentikasi arsip dinamis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentisitas arsip dinamis)
000.5.4	Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital dan Pemulihan Arsip Vital)	

000.5.5 Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentifikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga

000.5.6 Penyusutan Arsip

000.5.6.1 Pemindahan arsip (antara lain: berita acara pemindahan, daftar arsip yang dipindahkan)

000.5.6.2 Pemusnahan arsip (antara lain: SK penetapan panitia penilai arsip, pertimbangan panitia penilai, permintaan persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia pemusnahan arsip dengan retensi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun atau persetujuan kepala daerah selaku pimpinan pencipta arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun, penetapan arsip yang dimusnahkan, berita acara pemusnahan arsip, daftar arsip yang dimusnahkan.

000.5.6.3 Penyerahan arsip statis (antara lain: pembentukan panitia penilai, notulen rapat panitia, surat pertimbangan panitia penilai, surat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan, surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, keputusan penetapan penyerahan, berita acara penyerahan arsip, daftar arsip yang diserahkan)

000.5.7 Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan Alih Media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang Alih Mediakan)

000.5.8 Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis

000.5.8.1 Data base pengelolaan arsip aktif

000.5.8.2 Data base pengelolaan arsip inaktif

000.5.9 Pengelolaan Arsip Statis

000.5.9.1 Akuisisi (antara lain: monitoring fisik dan daftar, verifikasi terhadap daftar arsip, menetapkan status arsip statis, persetujuan untuk penyerahan, penetapan arsip yang diserahkan berita acara penyerahan, daftar arsip yang diserahkan)

000.5.9.2 Penghargaan dan imbalan

000.5.9.3 Sejarah lisan (antara lain: administrasi kegiatan, berita acara wawancara sejarah lisan, laporan kegiatan, hasil wawancara (kaset/cd/media lain sesuai perkembangan TI, dan transkip)

000.5.9.4 Daftar pencarian arsip statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)

000.5.9.5 Menyusun sarana bantu temu balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, *guide*)

000.5.9.6 Preservasi preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)

000.5.9.7 Preservasi kuratif

000.5.9.8 Autentikasi arsip statis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentitas arsip statis)

000.5.9.9 Akses arsip statis (antara lain: layanan arsip, penerbitan naskah sumber)

000.5.10 Jasa Kearsipan (antara lain: Konsultasi Kearsipan, Manual Kearsipan, Penataan Arsip, Otomasi Kearsipan, Penyimpanan Arsip, Perawatan dan Pemeliharaan Arsip)

000.5.11 Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)

000.5.12 Pelindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana

000.5.13 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Digabung dan/atau Dibubarkan

000.5.14 Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

000.5.15 Pengawasan Kearsipan

000.5.15.1 Pengawasan kearsipan internal

000.5.15.2 Pengawasan kearsipan eksternal

000.5.15.3 Sanksi

000.6 PERSANDIAN

000.6.1 Kebijakan di Bidang Persandian yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

000.6.2 Pengamanan Persandian

000.6.2.1 Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kripto

000.6.2.2 Analisis sinyal: teknik sandi dan kripto

000.6.2.3 Materiil sandi: sistem dan peralatan

000.6.3	Pengkajian Persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi	
	000.6.3.1	Perencanaan pengkajian
	000.6.3.2	Administrasi pengkajian
	000.6.3.3	Pelaksanaan
	000.6.3.4	Pelaporan
000.6.4	Pembinaan dan Pengendalian Persandian	
	000.6.4.1	Sumber Daya Manusia (SDM)
	000.6.4.2	Jaring komunikasi
000.6.5	Layanan Sertifikasi Elektronik	
	000.6.5.1	Perencanaan dan administrasi
	000.6.5.2	Pelaksanaan verifikasi
	000.6.5.3	Pelaksanaan perjanjian kerja sama
	000.6.5.4	Penyesuaian sistem dan testing
	000.6.5.5	Pelaksanaan bimbingan teknis pengguna
	000.6.5.6	Pelaksanaan penerbitan sertifikat elektronik
	000.6.5.7	Pelaporan
000.7	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
000.7.1	Musyawarah Perencanaan Pembangunan/ Musrenbang	
	000.7.1.1	Musrenbang provinsi
	000.7.1.2	Musrenbang nasional
	000.7.1.3	Musrenbang kabupaten/kota
	000.7.1.4	Musrenbang kecamatan
	000.7.1.5	Musrenbang kelurahan
	000.7.1.6	Musrenbang desa
000.7.2	Perencanaan Pembangungan Daerah	
	000.7.2.1	Rencana pembangunan jangka panjang
	000.7.2.2	Rencana pembangunan jangka menengah
	000.7.2.3	Rencana anggaran daerah
	000.7.2.4	Rencana pembangunan tahunan

	000.7.2.5	Rencana pembentukan satuan kerja perangkat daerah
	000.7.2.6	Program kerja tahunan
	000.7.2.7	Penetapan/kontrak kinerja
	000.7.2.8	Laporan berkala
	000.7.2.9	Laporan insidential
	000.7.2.10	Evaluasi program
000.7.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	
000.7.4	Konsultasi Perencanaan Pembangunan	
000.7.5	Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	
000.7.6	Aksi Strategis Daerah	
	000.7.6.1	Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah
	000.7.6.2	Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah
	000.7.6.3	Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah
	000.7.6.4	Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah
	000.7.6.5	Penerapan perencaan aksi strategi daerah
000.7.7	Perencanaan Pendanaan Pembangunan	
	000.7.7.1	Pendanaan nasional dan hibah
	000.7.7.2	Pendanaan daerah
	000.7.7.3	Kerja sama pembangunan nasional
	000.7.7.4	Surat berharga syariah negara
	000.7.7.5	Pendanaan *on top* atau inisiatif baru
000.8	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	
000.8.1	Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	000.8.1.1	Pembentukan
	000.8.1.2	Pengubahan
	000.8.1.3	Pembubaran

000.8.2 Uraian Jabatan
- 000.8.2.1 Analisa jabatan
- 000.8.2.2 Analisa beban kerja

000.8.3 Ketatalaksanaan
- 000.8.3.1 Proses bisnis
- 000.8.3.2 Standar pelayanan
- 000.8.3.3 Standar operasional prosedur
- 000.8.3.4 Pelayanan publik

000.8.4 Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional

000.8.5 Evaluasi Kelembagaan

000.8.6 Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi
- 000.8.6.1 Budaya kerja
- 000.8.6.2 Penilaian mandiri reformasi birokrasi
- 000.8.6.3 Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

000.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN

000.9.1 Kebijakan di bidang Penelitian, Pengkajian, Pengembangan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

000.9.2 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan meliputi: Rencana Kerja, Administrasi Penelitian, Pelaksanaan, Hasil Penelitian/Pengkajian/Rekomendasi

000.9.3 Sosialisasi dan Desiminasi Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan

000.9.4 Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan

000.9.5 Forum Komunikasi Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

000.9.6 Data dan Informasi Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 000.9.6.1 Data
- 000.9.6.2 Statistik
- 000.9.6.3 Jurnal hasil penelitian/ pengkajian

000.9.7 *Master Proceeding*/Jurnal Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

000.9.8 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

000.9.9 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

000.9.10 Seminar, Lokakarya, Temukarya, *Workshop*

100 PEMERINTAHAN

100.1 OTONOMI DAERAH

100.1.1 Kebijakan di Bidang Otonomi Daerah yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

100.1.2 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)

100.1.3 Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)

100.1.4 Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)

100.1.4.1 Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah

100.1.4.2 Administrasi kepala daerah dan DPRD

100.1.4.3 Penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas kepala daerah dan DPRD di bidang pemerintahan

100.1.4.4 Hubungan antar lembaga daerah (pemerintah daerah dan DPRD)

100.1.4.5 Assosiasi daerah

100.1.5 Otonomi Khusus dan Daerah Istimewa

100.1.6 Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)

100.1.6.1 Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

100.1.6.2 Kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah

100.1.6.3 Pengembangan kapasitas daerah

100.1.7 LKPJ/LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)

100.2 PEMERINTAHAN UMUM

100.2.1 Kebijakan di Bidang Pemerintahan Umum yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

100.2.2 Dekonsentrasi dan Kerja Sama

100.2.2.1 Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan

100.2.2.2 Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi tugas gubernur sebagai wakil pemerintah

100.2.2.3 Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kerja sama daerah

100.2.2.4 Fasilitasi kecamatan

100.2.2.5 Fasilitasi pelayanan umum

100.2.3 Wilayah Administrasi dan Perbatasan

100.2.3.1 Toponimi dan data wilayah

100.2.3.2 Pengembangan dan penataan batas antar negara

100.2.3.3 Batas antar daerah wilayah

100.2.3.4 Penataan batas wilayah antar kecamatan, batas wilayah antar kelurahan satu kecamatan dan batas wilayah kelurahan antar kecamatan

100.2.3.5 Pemeliharaan batas wilayah

100.3	HUKUM	
	100.3.1	Program Legislasi
		100.3.1.1 Bahan/materi program legislasi daerah
		100.3.1.2 Program legislasi
	100.3.2	Rancangan Peraturan Perundang-undangan Rancangan Peraturan Daerah, termasuk Naskah Akademik, Rancangan Awal sampai dengan Rancangan Akhir dan Telaah Hukum sampai Diundangkan
	100.3.3	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah
		100.3.3.1 Keputusan/ketetapan gubernur
		100.3.3.2 Keputusan/ketetapan bupati
		100.3.3.3 Keputusan/ketetapan Wali Kota
		100.3.3.4 Keputusan sekretaris daerah provinsi
		100.3.3.5 Keputusan sekretaris daerah kabupaten
		100.3.3.6 Keputusan sekretaris daerah kota
	100.3.4	Instruksi/Surat Edaran
		100.3.4.1 Instruksi/surat edaran provinsi
		100.3.4.2 Instruksi/surat edaran kabupaten
		100.3.4.3 Instruksi/surat edaran kota
		100.3.4.4 Instruksi/surat edaran setingkat eselon II
	100.3.5	Surat Perintah
		100.3.5.1 Surat perintah gubernur
		100.3.5.2 Surat perintah bupati
		100.3.5.3 Surat perintah Wali Kota
		100.3.5.4 Surat perintah setingkat eselon II
	100.3.6	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis
	100.3.7	Nota Kesepakatan/*Memorandum of Understanding* (MOU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama

100.3.7.1 Dalam negeri
100.3.7.2 Luar negeri
100.3.8 Dokumentasi Hukum, (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-peraturan yang Dijadikan Referensi)
100.3.9 Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum
100.3.10 Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)
100.3.11 Kasus/Sengketa Hukum
100.3.11.1 Pidana kasus/sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran
100.3.11.2 Perdata kasus/sengketa perdata
100.3.11.3 Tata usaha negara
100.3.11.4 Perburuhan
100.3.11.5 Arbitrase
100.3.11.6 Sengketa adat
100.3.12 Perizinan
100.3.13 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
100.3.13.1 Hak cipta
100.3.13.2 Hak paten
100.3.13.3 Hak desain industri
100.3.13.4 Hak rahasia dagang
100.3.13.5 Hak merek
100.3.14 Permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang Ditolak

200 POLITIK

200.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

200.1.1 Kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
200.1.2 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
200.1.2.1 Ketahanan ideologi negara
200.1.2.2 Wawasan kebangsaan

	200.1.2.3	Bela negara
	200.1.2.4	Nilai-nilai sejarah kebangsaan
	200.1.2.5	Pembauran dan kewarganegaraan
200.1.3	Kewaspadaan Nasional	
	200.1.3.1	Fasilitasi dan evaluasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan
	200.1.3.2	Fasilitasi bina masyarakat perbatasan antar negara dan kehidupan masyarakat perbatasan
	200.1.3.3	Fasilitasi dan evaluasi penanganan konflik pemerintahan
	200.1.3.4	Fasilitasi dan laporan penanganan konflik sosial
	200.1.3.5	Fasilitasi pengawasan orang asing dan lembaga asing
200.1.4	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan	
	200.1.4.1	Ketahanan seni
	200.1.4.2	Ketahanan budaya
	200.1.4.3	Agama dan kepercayaan
	200.1.4.4	Organisasi kemasyarakatan
	200.1.4.5	Masalah sosial kemasyarakatan
	200.1.4.6	Fasilitasi
	200.1.4.7	Pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat
	200.1.4.8	Laporan hasil kerja sama kegiatan dengan ormas/LNL
	200.1.4.9	Evaluasi aktifitas ormas: Sanksi administrasi
	200.1.4.10	Fasilitasi sengketa ormas
	200.1.4.11	Fasilitasi ormas
200.1.5	Politik Dalam Negeri	
	200.1.5.1	Implementasi kebijakan politik

		200.1.5.2	Fasilitasi kelembagaan politik pemerintahan
		200.1.5.3	Fasilitasi kelembagaan partai politik
		200.1.5.4	Verifikasi dan evaluasi partai politik yang memperoleh kursi
		200.1.5.5	Partai politik yang tidak memperoleh kursi
		200.1.5.6	Pemerintah daerah
		200.1.5.7	Data base partai politik
		200.1.5.8	Pendidikan budaya politik
		200.1.5.9	Pemilihan umum
	200.1.6	Ketahanan Ekonomi	
		200.1.6.1	Ketahanan sumber daya alam dan kesenjangan perekonomian
		200.1.6.2	Ketahanan perdagangan investasi, fiskal dan moneter
		200.1.6.3	Perilaku perekonomian masyarakat
		200.1.6.4	Ketahanan lembaga sosial ekonomi
200.2	PEMILU		
	200.2.1	Kebijakan di Bidang Pemilu yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	200.2.2	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	
		200.2.2.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)
		200.2.2.2	Daftar Pemilih Sementara (DPS)
		200.2.2.3	Daftar pemilih tambahan
		200.2.2.4	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)
		200.2.2.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
	200.2.3	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	
		200.2.3.1	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik

	200.2.3.2	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik
	200.2.3.3	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari calon perseorangan
	200.2.3.4	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual
200.2.4	Penetapan Peserta Pemilu	
	200.2.4.1	Penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi anggota
	200.2.4.2	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi anggota DPR
	200.2.4.3	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi anggota DPR
	200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota
	270.04.05	Peta daerah pemilihan
200.2.5	Pencalonan Pemilu	
	200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan
	200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran
	200.2.5.3	Daftar bakal calon
	200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon
	200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi
	200.2.5.6	Daftar calon sementara dan calon tetap
200.2.6	Kampanye Pemilu	
	200.2.6.1	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye
	200.2.6.2	Nama juru kampanye/ pelaksana kampanye
	200.2.6.3	Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye

200.2.7 Dana Kampanye

200.2.7.1 Pedoman audit dana kampanye

200.2.7.2 Laporan dana kampanye peserta Pemilu

200.2.7.3 Laporan hasil audit dana kampanye

200.2.8 Pemungutan dan Penghitungan Suara

200.2.8.1 Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara

200.2.8.2 Master surat suara

200.2.8.3 Surat suara yang terpakai

200.2.8.4 Surat suara tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)

200.2.8.5 Formulir Pemilu di pemerintah daerah

200.2.9 Penetapan Hasil Pemilu

200.2.10 Perselisihan Hasil Pemilu

200.2.10.1 Surat-surat mengenai perselisihan hasil Pemilu

200.2.10.2 Jawaban dan kesimpulan termohon

200.2.10.3 Salinan putusan lembaga peradilan

200.2.11 Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilu

300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN

300.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

300.1.1 Kebijakan di Bidang Polisi Pamong Praja yang Dilakukan di Pemerintah Daerah

300.1.2 Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja

300.1.2.1 Tata operasional polisi pamong praja

300.1.2.2 Sarana prasarana polisi pamong praja

300.1.3 Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja

300.1.4 Perlindungan Masyarakat

300.1.5 Penyidik Pegawai Negeri Sipil

300.1.6 Perlindungan Hak-hak Sipil dan Hak Asasi Manusia

300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN

300.2.1 Kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

300.2.2 Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan

300.2.2.1 Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan

300.2.2.2 Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring

300.2.2.3 Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan

300.2.2.4 Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan

300.2.2.5 Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, siaga dan latihan, tempat latihan

300.2.2.6 Registrasi BEACON

300.2.3 Pencegahan dan Kesiapsiagaan

300.2.4 Potensi Pencarian dan Pertolongan

300.2.5 Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan

300.2.5.1 Rencana pendidikan dan pelatihan

300.2.5.2 Penyiapan tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan

300.2.5.3 Pemasyarakatan dan sertifikasi pencarian dan pertolongan

300.2.5.4 Pemasyarakatan pencarian dan pertolongan (sosialisasi dan penyuluhan)

300.2.5.5 Sertifikasi pencarian dan pertolongan

300.2.6 Operasi Pencarian dan Pertolongan

300.2.7 Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi

300.2.8 Operasi Komunikasi

300.2.8.1 Operasi peralatan komunikasi (berita SAR)

300.2.8.2 Operasi peralatan deteksi dini (berita SAR)

300.2.8.3 Registrasi BEACON

300.2.9 Inventarisasi dan Pemeliharaan

300.2.10 Pengembangan Sistem Informasi

300.2.11 Penyajian dan Layanan Informasi

300.2.12 Pelapooran dan Evaluasi

300.2.12.1 Laporan harian

300.2.12.2 Laporan bulanan

300.2.12.3 Laporoan tahunan

300.2.12.4 Evaluasi

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

400.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

400.1.1 Kebijakan di Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.1.2 Pembangunan Sumber Daya

400.1.2.1 Fasilitasi pendidikan ketrampilan pengembangan sumber daya

400.1.2.2 Fasilitasi kesehatan pengembangan sumber daya

400.1.2.3 Fasilitasi sumber daya hayati dan pengembangan sumber daya

	400.1.2.4	Fasilitasi mineral, energi dan lingkungan hidup
	400.1.2.5	Fasilitasi teknologi dan inovasi
	400.1.2.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya
	400.1.2.7	Pemantauan dan evaluasi
400.1.3	Peningkatan Infrastruktur	
	400.1.3.1	Fasilitasi transportasi peningkatan infrastruktur
	400.1.3.2	Fasilitasi informasi dan telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.3	Fasilitasi sosial dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.4	Fasilitasi ekonomi dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.5	Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur
	400.1.3.7	Pemantauan dan evaluasi
400.1.4	Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha	
	400.1.4.1	Fasilitasi investasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.2	Fasilitasi kelembagaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.3	Fasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah
	400.1.4.4	Fasilitasi kemitraan usaha
	400.1.4.5	Fasilitasi pengembangan komoditas unggulan
	400.1.4.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.7	Pemantauan dan evaluasi

	400.1.4.8	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
	400.1.4.9	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
	400.1.4.10	Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal
	400.1.4.11	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
	400.1.4.12	Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
	400.1.4.13	Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal
	400.1.4.14	Fasilitasi kerja sama antar desa
400.1.5	Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya	
	400.1.5.1	Penguatan kapasitas lembaga lokal
	400.1.5.2	Penguatan organisasi masyarakat
	400.1.5.3	Pemberdayaan masyarakat
	400.1.5.4	Kerja sama antar lembaga sosial dan budaya
	400.1.5.5	Ketenagakerjaan
	400.1.5.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya
	400.1.5.7	Pemantauan dan evaluasi
400.1.6	Pengembangan Daerah Khusus	
	400.1.6.1	Fasilitasi pengembangan daerah perbatasan
	400.1.6.2	Fasilitasi pengembangan daerah rawan konflik dan bencana
	400.1.6.3	Fasilitasi pengembangan daerah perdesaan
	400.1.6.4	Fasilitasi pengembangan daerah pulau terpencil dan terluar

400.1.6.5 Fasilitasi pengembangan wilayah strategis

400.1.6.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus

400.1.6.7 Pemantauan dan evaluasi

400.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

400.2.1 Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.2.2 Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum

400.2.2.1 Data gender

400.2.2.2 Advokasi dan fasilitasi

400.2.3 Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)

400.2.3.1 Pencegahan kekerasan terhadap perempuan

400.2.3.2 Data perlindungan perempuan

400.2.3.3 Advokasi dan fasilitasi

400.2.3.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan

400.2.3.5 Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender

400.2.3.6 Analisis dan penyajian informasi gender

400.2.3.7 Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu

400.2.4 Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan dengan Hukum)

400.2.4.1 Pencegahan kekerasan terhadap anak

400.2.4.2 Data perlindungan anak

400.2.4.3 Advokasi dan fasilitasi

400.2.4.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak

400.2.4.5 Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak

400.2.5 Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)

400.2.5.1 Pemenuhan hak anak

400.2.5.2 Data klaster hak anak

400.2.5.3 Data tumbuh kembang anak

400.2.5.4 Advokasi dan fasilitasi

400.2.5.5 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak

400.2.5.6 Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak

400.2.6 Penghargaan terkait Gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)

400.2.7 Penghargaan Kota Layak Anak

400.2.8 Penghargaan Kelurahan Ramah Perempuan Peduli Anak

400.3 PENDIDIKAN

400.3.1 Kebijakan di Bidang Pendidikan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.3.2 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal, Informal

400.3.2.1 Bahan ajar (alat permainan edukatif)

400.3.2.2 Pelatihan sosial

400.3.2.3 Peringatan hari anak

400.3.2.4 *Block grant*

400.3.3 Pendidikan Masyarakat

400.3.3.1 Penyelenggaraan program

400.3.3.2 Penilaian dan pemberian bantuan sosial

	400.3.3.3	Pembinaan program
	400.3.3.4	Lomba/pemberian penghargaan
	400.3.3.5	pameran
	400.3.3.6	Rakor
	400.3.3.7	Sosialisasi
	400.3.3.8	Sertifikasi dan akreditasi
400.3.4	Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik	
400.3.5	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama	
	400.3.5.1	Kurikulum, bahan ajar
	400.3.5.2	*Block grant*
	400.3.5.3	Pelatihan, bimtek, sosialisasi,
	400.3.5.4	Lomba, penghargaan, penganugerahan
	400.3.5.5	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
	400.3.5.6	Bantuan siswa miskin
400.3.6	Pendidikan Khusus/Layanan Khusus	
	400.3.6.1	Kurikulum, bahan ajar, alat bantu pembelajaran
	400.3.6.2	*Block grant*
	400.3.6.3	Lomba, festival
	400.3.6.4	Sosialisasi, bimtek
	400.3.6.5	Pendataan
	400.3.6.6	Kelembagaan
400.3.7	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik	
	400.3.7.1	Pendataan dan pemeetaan
	400.3.7.2	Uji kompetensi guru
	400.3.7.3	Sertifikasi guru
	400.3.7.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
	400.3.7.5	Peningkatan kesejahteraan guru
	400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek
	400.3.7.7	*Block grant*
400.3.8	Sekolah Menengah Atas	
	400.3.8.1	Kurikulum
	400.3.8.2	Bahan ajar

	400.3.8.3	Pelatihan
	400.3.8.4	*Block grant*
	400.3.8.5	Bimbingan teknis/sosialisasi
	400.3.8.6	Lomba, sayembara, festival
	400.3.8.7	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
	400.3.8.8	Bantuan siswa miskin
400.3.9	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus	
	400.3.9.1	Bahan ajar
	400.3.9.2	Petunjuk teknis
	400.3.9.3	*Block grant*
	400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek
	400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival
	400.3.9.6	Kurikulum/bahan pembelajaran
	400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran
	400.3.9.8	Pendataan
	400.3.9.9	Kelembagaan (unit kesehatan sekolah, pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi)
400.3.10	Pendidik dan Tenaga Pendidik	
	400.3.10.1	Pendataan dan pemetaan
	400.3.10.2	Uji kompetensi guru
	400.3.10.3	Setifikasi guru
	400.3.10.4	Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah
	400.3.10.5	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
	400.3.10.6	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik
	400.3.10.7	*Block grant*
	400.3.10.8	Bimbingan teknis/sosialisasi
400.3.11	Penilaian Akademik	
400.3.12	Penilaian Non Akademik	
400.3.13	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian	
400.3.12	Data dan Statistik Pendidikan	

400.3.12.1 Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan

400.3.12.2 Data satuan pendidikan dan proses pembelajaran

400.3.13 Prasarana dan Sarana Pendidikan

400.3.13.1 Prasarana pendidikan

400.3.13.2 Sarana pendidikan

400.3.13.3 Monitoring dan evaluasi

400.4 KEOLAHRAGAAN

400.4.1 Kebijakan di Bidang Keolahragaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.4.2 Pengelolaan Olahraga Pendidikan

400.4.2.1 Olahraga pendidikan dasar dan menengah

400.4.2.2 Olahraga pendidikan tinggi

400.4.2.3 Olahraga pendidikan non formal dan informal

400.4.3 Pengelolaan Olahraga Rekreasi

400.4.3.1 Olahraga massal

400.4.3.2 Olahraga tradisional

400.4.3.3 Olahraga petualangan, tantangan dan wisata

400.4.4 Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga

400.4.4.1 Olahraga pendidikan

400.4.4.2 Olahraga rekreasi

400.4.4.3 Olahraga prestasi

400.4.4.4 Sekolah khusus olahraga

400.4.5 Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus

400.4.5.1 Olahraga tradisional

400.4.5.2 Layanan khusus

400.4.6 Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

400.4.6.1 Kemitraan keolahragaan

400.4.6.2 Penghargaan olahraga

400.4.7 Pembibitan dan IPTEK Olahraga
- 400.4.7.1 Pembibitan olahraga
- 400.4.7.2 Kompetisi
- 400.4.7.3 IPTEK olahraga

400.4.8 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
- 400.4.8.1 Tenaga keolahragaan
- 400.4.8.2 Organisasi keolahragaan

400.4.9 Industri dan Promosi Olahraga
- 400.4.9.1 Industri olahraga
- 400.4.9.2 Promosi olahraga

400.4.10 Olahraga Prestasi
- 400.4.10.1 Daerah
- 400.4.10.2 Nasional
- 400.4.10.3 Internasional

400.4.11 Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga
- 400.4.11.1 Standardisasi keolahragaan
- 400.4.11.2 Akreditasi dan sertifikasi keolahragaan
- 400.4.11.3 Infrastruktur olahraga

400.5 KEPEMUDAAN

400.5.1 Kebijakan di Bidang Kepemudaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.5.2 Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda
- 400.5.2.1 Penelusuran (duta kepemudaan)
- 400.5.2.2 Pengkajian (rekomendasi kepemudaan melalui forum kepemudaan)
- 400.5.2.3 Pengembangan

400.5.3 Peningkatan Wawasan Pemuda
- 400.5.3.1 Wawasan kebangsaan
- 400.5.3.2 Wawasan lingkungan
- 400.5.3.3 Wawasan sosial dan hukum

400.5.4 Peningkatan Kapasitas Pemuda
- 400.5.4.1 Kapasitas iman dan taqwa
- 400.5.4.2 Kapasitas IPTEK
- 400.5.4.3 Pemanfaatan IPTEK

400.5.5	Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/Seni Kepemudaan)	
	400.5.5.1	Pengkajian
	400.5.5.2	Pengembangan
	400.5.5.3	Pendayagunaan (fasilitasi)
400.5.6	Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	
	400.5.6.1	Kepemimpinan: penelusuran, pengaderan, pendayagunaan
	400.5.6.2	Kepeloporan pemuda: kesukarelawanan, pengembangan kepedulian, pendampingan
400.5.7	Kewirausahaan	
	400.5.7.1	Kelembagaan
	400.5.7.2	Pengaderan
	400.5.7.3	Perintisan
400.5.8	Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan	
	400.5.8.1	Pemberdayaan organisasi kepemudaan: kelembagaan dan sumber daya
	400.5.8.2	Pemberdayaan organisasi kemahasiswaan: kelembagaan dan sumber daya
	400.5.8.3	Pemberdayaan organisasi kepelajaran: kelembagaan dan sumber daya
	400.5.8.4	Pengawasan kepramukaan: kelembagaan, program dan sumber daya
400.5.9	Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda	
	400.5.9.1	Standardisasi
	400.5.9.2	Infrastruktur pemuda
400.5.10	Kemitraan dan Penghargaan Pemuda	
	400.5.10.1	Kemitraan
	400.5.10.2	Penghargaan pemuda

400.6 KEBUDAYAAN

400.6.1 Kebijakan di Bidang Kebudayaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.6.2 Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

400.6.2.1 Registrasi nasional

400.6.2.2 Pelindungan

400.6.2.3 Pengembangan dan pemanfaatan

400.6.2.4 Eksplorasi dan dokumentasi

400.6.3 Pembinaan Kesenian dan Perfilman

400.6.3.1 Pembinaan seni pertunjukan

400.6.3.2 Pembinaan seni rupa

400.6.3.3 Pembinaan seni literasi dan apresiasi film

400.6.3.4 Dokumentasi dan publikasi

400.6.4 Sejarah dan Nilai Budaya

400.6.4.1 Sejarah

400.6.4.2 Pemetaan nilai

400.6.4.3 Verifikasi dan perumusan nilai

400.6.4.4 Dokumentasi dan publikasi

400.6.4.5 Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah

400.6.4.6 Publikasi sejarah dan nilai sejarah

400.6.5 Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya

400.6.5.1 Internalisasi nilai budaya

400.6.5.2 Kekayaan budaya

400.6.5.3 Warisan budaya nasional dan dunia

400.6.5.4 Diplomasi budaya

400.7 KESEHATAN

400.7.1 Kebijakan di Bidang Kesehatan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.7.2 Upaya Kesehatan Dasar

400.7.2.1 Pelayanan kedokteran keluarga

400.7.2.2 Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer

	400.7.2.3	Pelaksanaan kesehatan primer
	400.7.2.4	Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas
	400.7.2.5	Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit
	400.7.2.6	ICD 10, *destistry* and *stomatology*
	400.7.2.7	Infeksi menular lewat transfusi darah
	400.7.2.8	Penyakit mulut di tingkat primer
	400.7.2.9	Pembiayaan darah
	400.7.2.10	Penggunaan darah rasional
	400.7.2.11	Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah
	400.7.2.12	Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan
	400.7.2.13	Akreditasi puskesmas
	400.7.2.14	Puskesmas berprestasi
400.7.3	Upaya Kesehatan Rujukan	
	400.7.3.1	Pelayanan kesehatan rujukan
	400.7.3.2	Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK)
	400.7.3.3	Pelayanan rumah sakit privat
	400.7.3.4	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
	400.7.3.5	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan
	400.7.3.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan
	400.7.3.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa
	400.7.3.8	Badan pengawas rumah sakit

	400.7.3.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)
	400.7.3.10	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
400.7.4	Keperawatan dan Keteknisian Medik	
	400.7.4.1	Pelayanan keperawatan dasar
	400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit
	400.7.4.3	Pelayanan keperawatan di rumah sakit umum
	400.7.4.4	Pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus
	400.7.4.5	Bina pelayanan kebidanan
400.7.5	Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan	
	400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi
	400.7.5.2	Patologi dan toksilogi
	400.7.5.3	Radiologi
	400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi
	400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan
	400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan
400.7.6	Kesehatan Jiwa	
	400.7.6.1	Kesehatan jiwa di nonfasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen
	400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya
	400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen
	400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok berisiko

400.7.7	Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra	
	400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa
	400.7.7.2	Imunisasi
	400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan
	400.7.7.4	Kesehatan matra
400.7.8	Pengendalian Penyakit Menular Langsung	
	400.7.8.1	Pengendalian tuberkolosis
	400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual
	400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut
	400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
	400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia
400.7.9	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	
	400.7.9.1	Pengendalian malaria
	400.7.9.2	Pengendalian *arbovirosis*
	400.7.9.3	Pengendalian *zoonosis*
	400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan
400.7.10	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	
	400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
	400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
	400.7.10.3	Penyakit kanker
	400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif
	400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
400.7.11	Penyehatan Lingkungan	
	400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar
	400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum

	400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat
	400.7.11.4	Higien sanitasi pangan
	400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi
400.7.12	Pengembangan dan Penapisan Teknologi Pengendalian Penyakit dan Pengendalian Lingkungan	
400.7.13	Gizi	
	400.7.13.1	Gizi makro
	400.7.13.2	Gizi mikro
	400.7.13.3	Gizi klinik dan diatetik
	400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan
	400.7.13.5	Kewaspadaan gizi
400.7.14	Kesehatan Ibu	
	400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil
	400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas
	400.7.14.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi
	400.7.14.4	Keluarga berencana
	400.7.14.5	Perlindungan kesehatan reproduksi
400.7.15	Kesehatan Anak	
	400.7.15.1	Kelangsungan hidup bayi
	400.7.15.2	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah
	400.7.15.3	Kewaspadaan penanganan balita berisiko
	400.7.15.4	Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja
	400.7.15.5	Perlindungan kesehatan anak
400.7.16	Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer	
	400.7.16.1	Kesehatan tradisional keterampilan
	400.7.16.2	Kesehatan tradisional ramuan

	400.7.16.3	Kesehatan alternatif dan komplementer
	400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan
400.7.17	Kesehatan Kerja dan Olahraga	
	400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja
	400.7.17.2	Kapasitas kerja
	400.7.17.3	Lingkungan kerja
	400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja
	400.7.17.5	Kesehatan perkotaan
	400.7.17.6	Kesehatan olahraga
400.7.18	Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	
	400.7.18.1	Harga obat publik
	400.7.18.2	Pengadaan obat
	400.7.18.3	Perbekalan kesehatan
400.7.19	Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan	
	400.7.19.1	Alat kesehatan
	400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat
	400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga
400.7.20	Kefarmasian	
	400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian
	400.7.20.2	Farmasi klinis
	400.7.20.3	Farmasi komunitas
	400.7.20.4	Penggunaan obat rasional
400.7.21	Produksi dan Distribusi Kefarmasian	
	400.7.21.1	Obat tradisional
	400.7.21.2	Kosmetik dan makanan
	400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus
	400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat
400.7.22	Surat Keterangan, Sertifikasi, dan Perizinan	
	400.7.22.1	Surat keterangan
	400.7.22.2	Sertifikasi dan perizinan

400.7.23	Penanggulangan Krisis Kesehatan	
	400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
	400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan
	400.7.23.3	Pemantauan dan informasi
	400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan
	400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana
400.7.24	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan	
	400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun
	400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN
400.7.25	Intelegensia Kesehatan	
	400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan
	400.7.25.2	Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan
400.7.26	Kesehatan Haji	
	400.7.26.1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji
	400.7.26.2	Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji
400.7.27	Promosi Kesehatan	
	400.7.27.1	Sarana promosi kesehatan
	400.7.27.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran
	400.7.27.3	Pengembangan pesan promosi kesehatan
	400.7.27.4	Hari kesehatan

400.7.28 Data dan Informasi

400.7.28.1 Statistik kesehatan

400.7.28.2 Analisis dan diseminasi informasi

400.7.28.3 Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan

400.7.29 Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplimen

400.7.29.1 Penilaian obat tradisional, suplemen makanan, dan kosmetik

400.7.29.2 Standardisasi obat tradisional, kosmetik, dan produk komplimen

400.7.29.3 Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik, dan produk komplimen

400.7.29.4 Obat asli Indonesia

400.7.30 Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

400.7.30.1 Penilaian keamanan pangan

400.7.30.2 Standardisasi produk pangan

400.7.30.3 Inspeksi dan sertifikasi produk pangan

400.7.30.4 Surveilan dan penyuluhan keamanan pangan

400.7.30.5 Pengawasan produk dan bahan berbahaya

400.7.31 Rekam Medis

400.8 AGAMA DAN KEPERCAYAAN

400.8.1 Kebijakan di Bidang Agama dan Kepercayaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.8.2 Fasilitasi

400.8.2.1 Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) provinsi/ kabupaten/kota

400.8.2.2 Pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan

400.8.2.3 Pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayan

400.8.2.4 Kasus keagamaan

400.8.2.5 Kasus aliran keagamaan

400.8.3 Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa

400.8.3.1 Kelembagaan dan kepercayaan

400.8.3.2 Pembinaan kerukunan hidup beragama

400.8.3.3 Komunitas kepercayaan

400.8.3.4 Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional

400.8.3.5 Lingkungan budaya dan pranata sosial

400.9 SOSIAL

400.9.1 Kebijakan di Bidang Sosial yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.9.2 Kesejahteraan Sosial Anak

400.9.2.1 Kesejahteraan sosial anak balita

400.9.2.2 Kesejahteraan sosial anak terlantar

400.9.2.3 Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum

400.9.2.4 Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan

400.9.2.5 Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus

400.9.3 Rehabilitasi Sosial

400.9.3.1 Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental

	400.9.3.2	Kelembagaan dan advokasi sosial
	400.9.3.3	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial
400.9.4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	
	400.9.4.1	Gelandangan, pengemis dan pemulung
	400.9.4.2	Tuna susila dan korban traffking perempuan
	400.9.4.3	Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi
	400.9.4.4	Pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas
400.9.5	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	
400.9.6	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	
	400.9.6.1	Pelayanan sosial dalam dan luar panti
	400.9.6.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerja sama lembaga
	400.9.6.3	Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan
400.9.7	Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	
400.9.8	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	
400.9.9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	
	400.9.9.1	Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan sumber daya
	400.9.9.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial

	400.9.9.3	Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial
	400.9.9.4	Kerja sama meliputi kerja sama pemerintah, kerja sama nonpemerintah
400.9.10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	
	400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan mitigasi
	400.9.10.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
	400.9.10.3	Pemulihan sosial dan penguatan sosial
	400.9.10.4	Kerja sama
400.9.11	Jaminan Sosial	
	400.9.11.1	Seleksi dan verifikasi
	400.9.11.2	Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi
	400.9.11.3	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran
	400.9.11.4	Kerja sama
400.9.12	Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial	
	400.9.12.1	Ketahanan keluarga
	400.9.12.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan
	400.9.12.3	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial
	400.9.12.4	Kemitraan dunia usaha
	400.9.12.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas

400.9.13 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

400.9.13.1 Persiapan pemberdayaan

400.9.13.2 Pemberdayaan sumber daya manusia

400.9.13.3 Penggalian dan pengembangan potensi

400.9.13.4 Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil

400.9.13.5 Kerja sama kelembagaan

400.9.14 Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan

400.9.14.1 Identifikasi dan analisis

400.9.14.2 Pengembangan kapasitas

400.9.14.3 Penataan sosial lingkungan kumuh

400.9.14.4 Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas

400.9.14.5 Bantuan langsung

400.9.14.6 Kerja sama kelembagaan

400.9.15 Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

400.9.15.1 Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan

400.9.15.2 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan

400.9.15.3 Pengembangan kesetiakawanan sosial

400.9.15.4 Pengelolaan taman makam pahlawan

400.10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

400.10.1 Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.10.2 Pemerintahan Desa dan Kelurahan

400.10.2.1 Fasilitasi pengembangan desa dan kelurahan

	400.10.2.2	Administrasi pemerintahan desa dan kelurahan
	400.10.2.3	Fasilitasi permusyawaratan desa
	400.10.2.4	Fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa
	400.10.2.5	Pengembangan kapasitas desa
400.10.3	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat	
	400.10.3.1	Lembaga masyarakat
	400.10.3.2	Pembangunan partisipatif
	400.10.3.3	Pendataan potensi masyarakat
	400.10.3.4	Pengembangan kawasan perdesaan
	400.10.3.5	Pelatihan masyarakat
400.10.4	Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	
	400.10.4.1	Budaya nusantara
	400.10.4.2	Pemberdayaan perempuan
	400.10.4.3	Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
	400.10.4.4	Kesejahteraan sosial
	400.10.4.5	Tenaga kerja perdesaan
400.10.5	Usaha Ekonomi Masyarakat	
	400.10.5.1	Usaha pertanian dan pangan
	400.10.5.2	Usaha perkreditan dan simpan pinjam
	400.10.5.3	Produksi dan pemasaran
	400.10.5.4	Usaha ekonomi dan keluarga
	400.10.5.5	Ekonomi perdesaan dan masyarakat tertinggal
400.10.6	Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan	
	400.10.6.1	Fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan
	400.10.6.2	Fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan

400.10.6.3 Fasilitasi prasarana dan sarana perdesaan

400.10.6.4 Fasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi perdesaan

400.10.6.5 Pemasyarakatan dan kerja sama teknologi perdesaan

400.10.7 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

400.11 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

400.11.1 Kebijakan di Bidang Pertamanan dan Pemakaman yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.11.2 Pertamanan

400.11.2.1 Perencanaan pertamanan

400.11.2.2 Taman kota

400.11.2.3 Tata hias dan ornamen kota

400.11.3 Pemakaman

400.11.3.1 Perencanaan pemakaman

400.11.3.2 Pemakaman

400.11.3.3 Pelayanan pemakaman

400.11.4 Jalur Hijau

400.11.4.1 Perencanaan jalur hijau

400.11.4.2 Jalur hijau jalan

400.11.4.3 Jalur hijau penyempurna dan tepian air

400.11.5 Peran Serta Masyarakat

400.11.6 Pengawasan dan Penindakan

400.11.7 Pengelolaan Data

400.11.8 Evaluasi dan Pelaporan

400.12 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

400.12.1 Kebijakan di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.12.2 Pendaftaran Penduduk

400.12.2.1 Identitas penduduk

	400.12.2.2	Pindah datang penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
	400.12.2.3	Pindah datang penduduk antar negara
	400.12.2.4	Pendataan penduduk rentan
	400.12.2.5	Monitoring evaluasi dan dokumentasi
400.12.3	Pencatatan Sipil	
	400.12.3.1	Kelahiran dan kematian
	400.12.3.2	Perkawinan dan perceraian
	400.12.3.3	Pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan
	400.12.3.4	Pencatatan kewarganegaraan
	400.12.3.5	Monitoring evaluasi dan dokumentasi
400.12.4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
	400.12.4.1	Sistem informasi administrasi kependudukan
	400.12.4.2	Kelembagaan informasi administrasi kependudukan
	400.12.4.3	Pengelolaan data administrasi kependudukan
	400.12.4.4	Penyajian dan layanan informasi administrasi kependudukan
	400.12.4.5	Monitoring evaluasi dan dokumentasi
400.12.5	Pengembangan Kebijakan Kependudukan	
	400.12.5.1	Kuantitas penduduk
	400.12.5.2	Kualitas penduduk
	400.12.5.3	Mobilitas penduduk
	400.12.5.4	Perlindungan dan pemberdayaan penduduk
	400.12.5.5	Pengembangan wawasan kependudukan, monitoring dan evaluasi

400.12.6 Penyerasian Kependudukan

400.12.6.1 Indikator kependudukan

400.12.6.2 Proyeksi penduduk

400.12.6.3 Perencanaan kependudukan

400.12.6.4 Penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga nonpemerintah

400.12.6.5 Pelaksanaan penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga pemerintah

400.13 KELUARGA BERENCANA

400.13.1 Kebijakan di Bidang Keluarga Berencana yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.13.2 Analisis Pengaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk

400.13.2.1 Pengumpulan dan pengolahan data

400.13.2.2 Evaluasi dan pelaporan

400.13.3 Fasilitas Pengaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk

400.13.3.1 Penyiapan fasilitas

400.13.3.2 Evaluasi dan pelaporan

400.13.4 Profil dan Proyeksi Penduduk

400.13.4.1 Data profil dan proyeksi penduduk

400.13.4.2 Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk

400.13.5 Penetapan Parameter Pengendalian Penduduk

400.13.5.1 Penetapan sasaran parameter

400.13.5.2 Evaluasi sasaran parameter

400.13.6 Pemanfaatan Perencanaan Pengendalian Penduduk

400.13.6.1 Pemanfaatan profil dan proyeksi

400.13.6.2 Pemanfaatan parameter

400.13.7	Pengembangan Sistem	
	400.13.7.1	Pengembangan sistem jalur pendidikan formal
	400.13.7.2	Pengembangan sistem jalur pendidikan nonformal dan informal
400.13.8	Pengembangan Materi	
	400.13.8.1	Pengembangan materi jalur pendidikan formal
	400.13.8.2	Pengembangan materi jalur pendidikan nonformal dan informal
400.13.9	Monitoring dan Evaluasi	
	400.13.9.1	Monitoring dan evaluasi jalur pendidikan formal
	400.13.9.2	Monitoring dan evaluasi jalur pendidikan nonformal dan informal
400.13.10	Analisis Sosial	
400.13.11	Analisis Ekonomi	
400.13.12	Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan	
400.13.13	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	
400.13.14	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah	
400.13.15	Jaminan Pelayanan dan Penyediaan Sarana Keluarga Berencana	
400.13.16	Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah	
	400.13.16.1	Standardisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
	400.13.16.2	Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah

400.13.17 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Swasta

400.13.18 Jaminan dan Ketersediaan Sarana Keluarga Berencana Swasta

400.13.19 Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Swasta

400.13.19.1 Standardisasi pelayanan keluarga berencana swasta

400.13.19.2 Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta

400.13.20 Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Jalur Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan

400.13.20.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan

400.13.20.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan

400.13.21 Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan

400.13.21.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan

400.13.21.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan

400.13.22 Kesertaan Keluarga Berencana Pria

400.13.22.1 Peningkatan akses keluarga berencana pria

400.13.22.2 Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria

400.13.23 Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi, dan Anak

400.13.24 Pencegahan PMS dan HIV/AIDS

400.13.25 Pencegahan Kanker Alat Reproduksi dan Penanggulangan Infertilitas

400.13.26 Pelembagaan Bina Keluarga Balita dan Anak

400.13.26.1 Pengembangan kelompok bina keluarga balita dan anak

400.13.26.2 Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak

400.13.27 Monitoring dan Evaluasi Bina Keluarga Balita dan Anak

400.13.27.1 Monitoring bina keluarga balita dan anak

400.13.27.2 Evaluasi dan pelaporan bina keluarga balita dan anak

400.13.28 Pelembagaan Bina Ketahanan Remaja

400.13.28.1 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan

400.13.28.2 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat

400.13.29 Monitoring dan Evaluasi Bina Ketahanan Remaja

400.13.29.1 Monitoring bina ketahanan remaja

400.13.29.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja

400.13.30 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

400.13.30.1 Pengembangan program bina ketahanan keluarga lansia

400.13.30.2 Pengembangan program bina ketahanan keluarga rentan

400.13.31 Pelembagaan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

400.13.31.1 Pengembangan kelompok bina ketahanan keluarga lansia dan rentan

400.13.31.2 Pengembangan kemitraan bina ketahanan keluarga lansia dan rentan

400.13.32 Monitoring dan Evaluasi Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

400.13.32.1 Monitoring bina ketahanan keluarga lansia dan rentan

400.13.32.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga lansia dan rentan

400.13.33 Pengembangan Program Usaha Ekonomi Keluarga

400.13.34 Peningkatan Teknologi dan Permodalan Usaha Ekonomi Keluarga

400.13.35 Peningkatan Manajemen Usaha Ekonomi Keluarga

400.13.35.1 Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga

400.13.35.2 Pengemangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga

400.13.36 Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Keluarga

400.13.37 Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera

400.13.38 Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

400.13.38.1 Pengembangan pusat pelayanan keluarga sejahtera

400.13.38.2 Pengembangan kemiitraan pusat pelayanan keluarga sejahtera

400.13.39 Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

400.13.39.1 Monitoring pusat pelayanan keluarga sejahtera

400.13.39.2 Evaluasi dan pelaporan pusat pelayanan keluarga sejahtera

400.13.40 Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi

400.13.40.1 Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi

400.13.40.2 Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi

400.13.41 Advokasi dan Pencitraan

400.13.42 Komunikasi, Informasi dan Edukasi

400.13.42.1 Promosi

400.13.42.2 Sarana produksi media komunikasi

400.13.42.3 Produk media komunikasi

400.13.43 Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Pusat dan Provinsi

400.13.44 Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota

400.13.44.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota

400.13.44.2 Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota

400.13.45 Hubungan dengan Lembaga Nonpemerintah

400.13.45.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah

400.13.45.2 Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah

400.13.46 Tenaga Lini Lapangan

400.13.46.1 Pengembangan tenaga lini lapangan

400.13.46.2 Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan

400.13.47 Institusi Masyarakat Pedesaan

400.13.47.1 Pengembangan institusi masyarakat pedesaan

400.13.47.2 Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan

400.13.48 Mekanisme Operasional Lini Lapangan
- 400.13.48.1 Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
- 400.13.48.2 Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan

400.13.49 Pengembangan Sistem Pencatatan dan Pelaporan
- 400.13.49.1 Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan
- 400.13.49.2 Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan

400.13.50 Pengumpulan dan Pengolahan Data

400.13.51 Analisis dan Evaluasi
- 400.13.51.1 Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk
- 400.13.51.2 Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera

400.13.52 Sistem Aplikasi dan Bank Data
- 400.13.52.1 Pengembangan sistem aplikasi
- 400.13.52.2 Pengelolaan bank data

400.13.53 Infrastruktur Teknologi Informasi
- 400.13.53.1 Pengembangan infrastruktur teknologi informasi
- 400.13.53.2 Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi

400.13.54 Dokumentasi dan Penyebarluasan Informasi
- 400.13.54.1 Dokumentasi dan perpustakaan
- 400.13.54.2 Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi

400.14 HUBUNGAN MASYARAKAT

400.14.1 Keprotokolan
- 400.14.1.1 Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)

400.14.1.2 Buku tamu keprotokolan

400.14.1.3 Agenda kegiatan pimpinan daerah

400.14.1.4 Kunjungan dinas dalam dan luar negeri

400.14.2 Daftar Nama/Alamat Kantor/Pejabat

400.14.3 Dokumentasi/Liputan Kegiatan Dinas Pimpinan, Acara Kedinasan dan Peristiwa-peristiwa Bidang Masing-masing, dalam Berbagai Media: Kertas, Foto/Video/Rekaman Suara/Multi Media

400.14.4 Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Informasi Kelembagaan

400.14.4.1 Kliping koran

400.14.4.2 Brosur /leaflet/poster/plakat

400.14.4.3 Pengumuman/pemberitaan

400.14.5 Hubungan antar Lembaga dan Pemerintahan Daerah

400.14.5.1 Hubungan antar lembaga pemerintah

400.14.5.2 Hubungan dengan organisasi sosial/LSM

400.14.5.3 Hubungan dengan perusahaan

400.14.5.4 Hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapang (PKL)

400.14.5.5 Forum kehumasan

400.14.5.6 Hubungan dengan media massa

400.14.6 Dengar Pendapat/*Hearing* DPRD

400.14.7 Bahan/Materi Pidato/Sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten

400.14.8 Penerbitan Majalah, Buletin, Koran dan Jurnal

400.14.9 Publikasi melalui Media Cetak maupun Elektronik

400.14.10 Pameran/Sayemara/Lomba/Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan
400.14.11 Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan
400.14.12 Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf

500 PEREKONOMIAN

500.1 KETAHANAN PANGAN

500.1.1 Kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan yang Dilakukan Pemerintah Daerah
500.1.2 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
500.1.2.1 Ketersediaan pangan
500.1.2.2 Akses pangan
500.1.2.3 Kerawanan pangan
500.1.3 Distribusi dan Cadangan Pangan
500.1.3.1 Distribusi pangan
500.1.3.2 Harga pangan
500.1.3.3 Cadangan pangan
500.1.4 Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan
500.1.4.1 Konsumsi pangan
500.1.4.2 Penganekaragaman pangan
500.1.4.3 Keamanan pangan segar
500.1.5 Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan
500.1.5.1 Dewan ketahanan pangan
500.1.5.2 Penghargaan ketahan pangan
500.1.6 Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)
500.1.7 Bimbingan Teknis
500.1.8 Evaluasi

500.2 PERDAGANGAN

500.2.1 Kebijakan di Bidang Perdagangan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.2.2 Perdagangan Dalam Negeri
500.2.2.1 Bina usaha kelembagaan dan penguatan usaha
500.2.2.2 Bina usaha jasa perdangan

	500.2.2.3	Bina usaha dagang asing dan keagenan
	500.2.2.4	Informasi perusahaan
	500.2.2.5	Pelaku pasar
	500.2.2.6	Iklim usaha dan bimbingan teknis usaha dagang kecil menengah
	500.2.2.7	Fasilitasi usaha dan pemasaran usaha dagang kecil menengah
	500.2.2.8	Pengembangan produk lokal
	500.2.2.9	Pencitraan produk dalam negeri
	500.2.2.10	Pengembangan sarana distribusi
	500.2.2.11	Pengelolaan sarana distribusi
	500.2.2.12	Kerja sama pengembangan sistem logistik
	500.2.2.13	Informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik
	500.2.2.14	Informasi pasar
	500.2.2.15	Informasi hasil industri
	500.2.2.16	Barang strategis
	500.2.2.17	Bahan pokok agro
500.2.3	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	
	500.2.3.1	Kelembagaan dan informasi standar
	500.2.3.2	Kerja sama standardisasi
	500.2.3.3	Perumusan dan penerapan standar
	500.2.3.4	Tata usaha
	500.2.3.5	Kerja sama, informasi, dan publikasi
	500.2.3.6	Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen
	500.2.3.7	Bimbingan konsumen dan pelaku usaha
	500.2.3.8	Fasilitas kelembagaan
	500.2.3.9	Produk pertambangan dan aneka industri

	500.2.3.10	Produk pertanian, kimia dan kehutanan
	500.2.3.11	Jasa
	500.2.3.12	Kerja sama
	500.2.3.13	Sarana dan kerja sama
	500.2.3.14	Kelembagaan dan dan penilaian
	500.2.3.15	UTTP dan standar ukuran
	500.2.3.16	Pengawasan
	500.2.3.17	Balai pengelolaan standar nasional satuan ukuran
	500.2.3.18	Balai pengujian UTTP
500.2.4	Perdagangan Berjangka Komoditi	
	500.2.4.1	Pengkajian pasar
	500.2.4.2	Pengawasan transaksi
	500.2.4.3	Pengawasan keuangan dan audit
	500.2.4.4	Pengkajian pasar
	500.2.4.5	Pengembangan pasar
	500.2.4.6	Sistem informasi
	500.2.4.7	Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang
	500.2.4.8	Pengawasan pasar lelang
	500.2.4.9	Pengawasan sistem gudang
500.2.5	Bimbingan Teknis	
500.2.6	Evaluasi	

500.3	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
500.3.1	Kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.3.2	Kelembagaan Koperasi dan UKM	
	500.3.2.1	Organisasi dan badan hukum koperasi
	500.3.2.2	Tata laksana koperasi dan UKM
	500.3.2.3	keanggotaan koperasi
	500.3.2.4	Pengendalian dan akuntabilitas

500.3.3	Produksi	
	500.3.3.1	Pertanian tanaman pangan dan hortikultura
	500.3.3.2	Kehutanan dan perkebunan
	500.3.3.3	Perikanan dan peternakan
	500.3.3.4	Industri kerajinan dan pertambangan
	500.3.3.5	Ketenagalistrikan dan aneka usaha
500.3.4	Pembiayaan	
	500.3.4.1	Program pendanaan
	500.3.4.2	Pengembangan dan pengendalian simpan pinjam
	500.3.4.3	Urusan permodalan
	500.3.4.4	Asuransi dan jasa keuangan
	500.3.4.5	Pembiayaan dan penjaminan kredit
	500.3.4.6	Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUKM
500.3.5	Pemasaran dan Jaringan Usaha	
	500.3.5.1	Perdagangan dalam negeri
	500.3.5.2	Ekspor dan impor
	500.3.5.3	Sarana dan prasarana pemasaran
	500.3.5.4	Kemitraan dan jaringan usaha
	500.3.5.5	Informasi dan publikasi bisnis
	500.3.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) koperasi dan UKM
500.3.6	Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	500.3.6.1	Pengembangan kewirausahaan
	500.3.6.2	Kebijakan pendidikan koperasi dan UKM
	500.3.6.3	Peran serta masyarakat
	500.3.6.4	Monitoring dan evaluasi pendidikan dan pelatihan koperasi dan UKM
	500.3.6.5	Advokasi

500.3.7 Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
- 500.3.7.1 Produktifitas dan mutu
- 500.3.7.2 Restrukturisasi usaha
- 500.3.7.3 Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
- 500.3.7.4 Fasilitasi investasi UKMK
- 500.3.7.5 Pengembangan sarana bisnis

500.3.8 Pengkajian Sumber Daya UKMK
- 500.3.8.1 Penelitian koperasi
- 500.3.8.2 Penelitian UKM
- 500.3.8.3 Penelitian sumber daya
- 500.3.8.4 Pengembangan perkaderan UMK

500.3.9 Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga

500.3.10 Pedagang Kaki Lima (PKL)
- 500.3.10.1 Peraturan perundang-undangan
- 500.3.10.2 Sarana dan prasarana

500.3.11 Monitoring dan Evaluasi

500.4 KEHUTANAN

500.4.1 Kebijakan di Bidang Kehutanan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.4.2 Penyuluhan
- 500.4.2.1 Program kerja penyuluhan
- 500.4.2.2 Materi penyuluhan
- 500.4.2.3 Program penyuluhan
- 500.4.2.4 Sarana penyuluhan
- 500.4.2.5 Pengembangan tenaga penyuluhan
- 500.4.2.6 Pelaksanaan penyuluhan
- 500.4.2.7 Pemberdayaan masyarakat
- 500.4.2.8 Deseminasi
- 500.4.2.9 Evaluasi dan laporan

500.4.3 Planologi Kehutanan
- 500.4.3.1 Perencanaan makro kawasan hutan
- 500.4.3.2 Penataan ruang kawasan hutan

	500.4.3.3	Statistik dan jaringan komunikasi data kehutanan
	500.4.3.4	Pengukuhan dan penataaan kawasan hutan
	500.4.3.5	Perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan
	500.4.3.6	Informasi dan dokumentasi kawasan hutan
	500.4.3.7	Inventarisasi sumber daya hutan
	500.4.3.8	Pemantauan sumber daya hutan
	500.4.3.9	Pemetaan sumber daya hutan
	500.4.3.10	Jaringan data spasial
	500.4.3.11	Penggunaan kawasan hutan
	500.4.3.12	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penggunaan kawasan hutan
	500.4.3.13	Informasi penggunaan kawasan hutan
	500.4.3.14	Pembentukan wilayah pengelolaan hutan
	500.4.3.15	Penyiapan areal pemanfaatan hutan
	500.4.3.16	Informasi wilayah pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan
500.4.4	Bina Usaha Kehutanan	
	500.4.4.1	Data areal HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.2	SK HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.3	Kerja sama
	500.4.4.4	Pembatalan/penolakan
	500.4.4.5	Perpanjangan
	500.4.4.6	Modal dan peralatan
	500.4.4.7	Investasi industri
	500.4.4.8	Peralatan
	500.4.4.9	Tenaga kerja

500.4.4.10	Pemegang saham
500.4.4.11	Neraca perusahaan
500.4.4.12	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
500.4.4.13	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)
500.4.4.14	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)
500.4.4.15	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)
500.4.4.16	Target produksi RKT dan beban kerja
500.4.4.17	Produksi kayu
500.4.4.18	Produksi nonkayu
500.4.4.19	Industri kayu HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.20	Industri kayu nonHPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.21	Industri nonkayu
500.4.4.22	Hutan tanaman industri PULP
500.4.4.23	Hutan tanaman industri pertukangan
500.4.4.24	Pelanggaran dan sanksi
500.4.4.25	Pemblokiran
500.4.4.26	Denda
500.4.4.27	Pencabutan areal HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.28	Pola pemanfaatan hutan produksi
500.4.4.29	Penataan pemanfaatan hutan produksi
500.4.4.30	Informasi sumber daya hutan produksi
500.4.4.31	Pengembangan investasi usaha
500.4.4.32	Penyiapan pemanfaatan hutan alam

	500.4.4.33	Rencana kerja pemanfaatan hutan alam/rencana kerja usaha produksi hasil
	500.4.4.34	Produksi hutan alam
	500.4.4.35	Penilaian kinerja usaha pemanfaatan hutan alam
	500.4.4.36	Pengembangan hutan tanaman industri
	500.4.4.37	Pengembangan hutan tanaman rakyat
	500.4.4.38	Pengembangan rencana kerja dan produksi hutan tanaman/rencana kerja usaha produksi
	500.4.4.39	Penilaian kinerja pengembangan usaha pemanfaatan hutan tanaman
	500.4.4.40	Pembiayaan hutan tanaman
	500.4.4.41	Penerimaan negara bukan pajak hasil hutan
	500.4.4.42	Peredaran hasil hutan
	500.4.4.43	Pengukuran dan pengujian hasil hutan
	500.4.4.44	Penertiban peredaran hasil hutan
	500.4.4.45	Pengolahan dan pemasaran hasil hutan
	500.4.4.46	Pengendalian bahan baku dan industri primer hasil hutan
	500.4.4.47	Penilaian kinerja industri dan pemasaran hasil hutan
	500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.49	Pembinaan PTI/TPTJ/silvikultur
500.4.5	Standardisasi dan Lingkungan	
	500.4.5.1	Standardisasi
	500.4.5.2	Sarana pengujian hasil hutan
	500.4.5.3	Pengembangan

	500.4.5.4	Pemasaran hasil hutan
	500.4.5.5	Pengendalian lingkungan
	500.4.5.6	Angkutan hasil hutan
	500.4.5.7	Tanda pengenal perusahaan tata usaha hasil hutan
	500.4.5.8	Legalitas tata usaha hasil hutan
	500.4.5.9	Palu tok kualitas tata usaha hasil hutan
	500.4.5.10	Pass angkutan hasil hutan
	500.4.5.11	Sertifikat ekspor hasil hutan
500.4.6	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	
	500.4.6.1	Flora dan fauna yang dilindungi
	500.4.6.2	Flora dan fauna yang tidak dilindungi
	500.4.6.3	Lembaga konservasi/kebun binatang
	500.4.6.4	Konvensi keanekaragaman hayati
	500.4.6.5	Kawasan konservasi
	500.4.6.6	Pengamanan hutan
	500.4.6.7	Program dan evaluasi penyidikan dan perlindungan
	500.4.6.8	Penyidikan dan perlindungan wilayah hutan
	500.4.6.9	Polisi kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	500.4.6.10	Pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam
	500.4.6.11	Bina cinta alam
	500.4.6.12	Kader konservasi sumber daya alam
	500.4.6.13	Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA
500.4.7	Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial	
	500.4.7.1	Pengelolaan benih
	500.4.7.2	Kebun benih

	500.4.7.3	Tegakan benih
	500.4.7.4	Pengadaan benih
	500.4.7.5	Pengujian dan penyimpanan benih
	500.4.7.6	Lalu lintas angkutan benih
	500.4.7.7	Pembibitan
	500.4.7.8	Lalu lintas angkutan benih
	500.4.7.9	Pengembangan usaha perbenihan
	500.4.7.10	Pengendalian peredaran benih
	500.4.7.11	Rehabilitasi hutan dan lahan
	500.4.7.12	Tanaman reboisasi
	500.4.7.13	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
	500.4.7.14	Perhutanan sosial
	500.4.7.15	Pengendalian perladangan
500.4.8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	
	500.4.8.1	Penelitian, pengkajian dan pengembangan kehutanan
	500.4.8.2	Monitoring dan evaluasi penelitian
	500.4.8.3	Diseminasi
	500.4.8.4	Gelar teknologi
	500.4.8.5	Forum komunikasi penelitian dan pengembangan
500.5	KELAUTAN DAN PERIKANAN	
500.5.1	Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.5.2	Perikanan Tangkap	
	500.5.2.1	Data dan statistik perikanan tangkap
	500.5.2.2	Rancang bangun dan kelaikan kapal perikanan
	500.5.2.3	Rancang bangun dan kelaikan alat tangkap ikan
	500.5.2.4	Pendaftaran kapal perikanan

	500.5.2.5	Pengawakan kapal dan ketenagakerjaan perikanan
	500.5.2.6	Perbantuan dan evaluasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan
	500.5.2.7	Alokasi usaha penangkapan ikan
	500.5.2.8	Tata pengusahaan penangkapan ikan
	500.5.2.9	Verifikasi dokumen penangkapan ikan
	500.5.2.10	Pelayanan dokumen penangkapan ikan
	500.5.2.11	Pemantauan dan evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan
	500.5.2.12	Kelembagaan usaha penangkapan
	500.5.2.13	Investasi dan permodalan usaha
	500.5.2.14	Kenelayanan
	500.5.2.15	Pembinaan pengelolaan usaha
	500.5.2.16	Pemantauan dan evaluasi usaha penangkapan ikan
500.5.3	Perikanan Budidaya	
	500.5.3.1	Potensi lahan dan air
	500.5.3.2	Prasarana dan sarana budidaya air tawar
	500.5.3.3	Pengelolaan induk perbenihan ikan air tawar
	500.5.3.4	Perbenihan skala kecil
	500.5.3.5	Informasi dan distribusi pembenihan
	500.5.3.6	Budidaya air tawar
	500.5.3.7	Budidaya ikan hias
	500.5.3.8	Sertifikasi budidaya perikanan
	500.5.3.9	Data dan statistik perikanan budidaya
	500.5.3.10	Hama dan penyakit ikan

	500.5.3.11	Perlindungan lingkungan budidaya
	500.5.3.12	Investasi dan permodalan usaha budidaya
	500.5.3.13	Kewirausahaan budidaya
	500.5.3.14	Pelayanan usaha budidaya
	500.5.3.15	Kelembagaan dan ketenagaakerjaan
	500.5.3.16	Promosi usaha dan budaya
500.5.4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	500.5.4.1	Standardisasi pengolahan hasil
	500.5.4.2	Pengembangan produk
	500.5.4.3	Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah
	500.5.4.4	Industri pengolahan
	500.5.4.5	Sarana dan prasarana pengolahan hasil
	500.5.4.6	Standardisasi pengembangan produk nonkonsumsi
	500.5.4.7	Promosi dan jaringan ikan hias
	500.5.4.8	Pengembangan industri
	500.5.4.9	Sarana dan prasarana pengembangan produk nonkonsumsi
	500.5.4.10	Kelembagaan pemasaran dalam negeri
	500.5.4.11	Analisis dan informasi pasar dalam negeri
	500.5.4.12	Jaringan distribusi dan kemitraan pemasaran dalam negeri
	500.5.4.13	Promosi dan kerja sama pemasaran dalam negeri
	500.5.4.14	Sarana dan prasarana pemasaran dalam negeri
	500.5.4.15	Kelembagaan pemasaran luar negeri

	500.5.4.16	Analisis dan informasi pemasaran luar negeri
	500.5.4.17	Pengembangan ekspor
	500.5.4.18	Pengembangan impor
	500.5.4.19	Promosi dan kerja sama pemasaran luar negeri
	500.5.4.20	Pelayanan usaha
	500.5.4.21	Kemitraan usaha
	500.5.4.22	Ketenagakerjaan pengolahan dan pemasaran
	500.5.4.23	Investasi dan permodalan
	500.5.4.24	Informasi dan promosi
500.5.5	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	
	500.5.5.1	Rencana tata ruang laut nasional dan perairan yurisdiksi
	500.5.5.2	Rencana tata ruang dan zona wilayah I
	500.5.5.3	Rencana tata ruang dan zona wilayah II
	500.5.5.4	Informasi dan evaluasi spasial
	500.5.5.5	Jejaring, data, dan informasi konservasi
	500.5.5.6	Konservasi wawasan
	500.5.5.7	Konservasi jenis ikan
	500.5.5.8	Pemanfaatan kawasan dan jenis ikan
	500.5.5.9	Mitigasi bencana lingkungan
	500.5.5.10	Pendayagunaan sumber daya kelautan
	500.5.5.11	Penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir dan laut
	500.5.5.12	Rehabilitasi dan reklamasi
	500.5.5.13	Identifikasi pulau-pulau terkecil
	500.5.5.14	Pengelolaan ekosistem pulau-pulau terkecil
	500.5.5.15	Investasi dan promosi pulau-pulau terkecil

	500.5.5.16	Sarana dan prasarana pulau-pulau terkecil
	500.5.5.17	Akses permodalan
	500.5.5.18	Akses ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.5.5.19	Sosial budaya masyarakat
	500.5.5.20	Pengembangan usaha
500.5.6	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	500.5.6.1	Pengawasan penangkapan wilayah barat
	500.5.6.2	Pengawasan penangkapan wilayah timur
	500.5.6.3	Pengawasan pengangkutan, pengolahan dan pemasaran
	500.5.6.4	Pengawasan usaha budidaya
	500.5.6.5	Pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi
	500.5.6.6	Pengawasan pencemaran perairan
	500.5.6.7	Pengawasan pesisir dan pulau-pulau terkecil
	500.5.6.8	Pengawasan jasa kelautan dan sumber daya nonhayati
	500.5.6.9	Logistik dan operasional wilayah barat
	500.5.6.10	Logistik dan operasional wilayah timur
	500.5.6.11	Perawatan kapal pengawas
	500.5.6.12	Pengawakan kapal pengawas
	500.5.6.13	Sistem pemantauan
	500.5.6.14	Pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan
	500.5.6.15	Pemantauan sumber daya perikanan
	500.5.6.16	Pengembangan infrastruktur pengawasan

	500.5.6.17	Penyidikan
	500.5.6.18	Penanganan barang bukti dan awak kapal
	500.5.6.19	Kerja sama penegakan hukum dan fasilitas PPNS perikanan
	500.5.6.20	Pemantauan dan evaluasi penanganan pelanggaran
500.5.7	Karantina Ikan	
	500.5.7.1	Pemeriksaan ikan
	500.5.7.2	Penahanan
	500.5.7.3	Pengasingan
	500.5.7.4	Pengamatan
	500.5.7.5	Pengakuan
	500.5.7.6	Penolakan
	500.5.7.7	Pemusnahan
	500.5.7.8	Persyaratan lalu lintas pemasukan
	500.5.7.9	Persyaratan lalu lintas pengeluaran
	500.5.7.10	Permohonan sertifikat
	500.5.7.11	Pemasukan formulir
	500.5.7.12	Pemasukan sertifikat
	500.5.7.13	Evaluasi dan monitoring sertifikat
	500.5.7.14	Surat perintah
	500.5.7.15	Rekomendasi
	500.5.7.16	Penutupan suatu area
	500.5.7.17	Pelanggaran lalu lintas ikan
	500.5.7.18	Pengawasan peraturan perkarantinaan
	500.5.7.19	Pengawasan pelaksanaan operasional
	500.5.7.20	Instalasi karantina sementara
	500.5.7.21	Lokasi karantina
500.6	PERTANIAN	
	500.6.1	Kebijakan di Bidang Pertanian yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.6.2	Perlindungan Hortikultura
	500.6.2.1	Perlindungan tanaman buah

	500.6.2.2	Perlindungan tanaman sayuran dan tanaman obat
	500.6.2.3	Perlindungan tanaman florikultura
	500.6.2.4	Dampak iklim dan persyaratan teknis
500.6.3	Perbenihan Hortikultura	
	500.6.3.1	Penilaian varietas
	500.6.3.2	Pengawasan mutu benih
	500.6.3.3	Budidaya dan pascapanen florikultura
500.6.4	Perluasan dan Pengelolaan Lahan	
	500.6.4.1	Basis data lahan
	500.6.4.2	Pengendalian lahan
	500.6.4.3	Optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan
	500.6.4.4	Perluasan kawasan tanaman pangan
	500.6.4.5	Perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan
500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi	
	500.6.5.1	Pengembangan sumber air
	500.6.5.2	Pengembangan jaringan dan optimasi air
	500.6.5.3	Iklim, konservasi air, dan lingkungan hidup
	500.6.5.4	Kelembagaan
500.6.6	Pembiayaan Pertanian	
	500.6.6.1	Pembiayaan program
	500.6.6.2	Pembiayaan syariah dan kerja sama
	500.6.6.3	Pembiayaan agribisnis
	500.6.6.4	Kelembagaan dan pemberdayaan agribisnis
500.6.7	Pupuk Pestisida	
	500.6.7.1	Pupuk organik dan pembenah tanah

	500.6.7.2	Pupuk anorganik
	500.6.7.3	Pestisida
	500.6.7.4	Pengawasan pupuk dan pestisida
500.6.8	Alat dan Mesin Pertanian	
	500.6.8.1	Pengembangan alat dan mesin pertanian
	500.6.8.2	Pengawasan dan peredaran alat dan mesin pertanian
	500.6.8.3	Kelembagaan dan pelayanan alat dan mesin pertanian
500.6.9	Perbenihan Tanaman Pangan	
	500.6.9.1	Penilaian varietas dan pengawasan mutu benih
	500.6.9.2	Produksi benih serealia
	500.6.9.3	Produksi benih aneka kacang dan umbi
	500.6.9.4	Kelembagaan benih
500.6.10	Budidaya Serealia	
	500.6.10.1	Padi irigasi dan rawa
	500.6.10.2	Padi tadah hujan dan lahan kering
	500.6.10.3	Jagung
	500.6.10.4	Serealia lain
500.6.11	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi	
	500.6.11.1	Kedelai
	500.6.11.2	Ubi kayu
	500.6.11.3	Aneka kacang
	500.6.11.4	Aneka umbi
500.6.12	Tanaman Pangan	
	500.6.12.1	Pengeloalan data organisasi pengganggu tumbuhan
	500.6.12.2	Dampak perubahan iklim
	500.6.12.3	Teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan
	500.6.12.4	Pengelolaan pengendalian hama tepadu

500.6.13	Pascapanen Tanaman Pangan	
	500.6.13.1	Padi
	500.6.13.2	Jagung dan serealia alin
	500.6.13.3	Kedelai dan aneka kacang
	500.6.13.4	Aneka umbi
500.6.14	Pengolahan Hasil Pertanian	
	500.6.14.1	Tanaman pangan
	500.6.14.2	Holtikurtura
	500.6.14.3	Perkebunan
	500.6.14.4	Peternakan
500.6.15	Mutu dan Standariasi	
	500.6.15.1	Standardisasi
	500.6.15.2	Penerapan dan pengawasan jaminan mutu
	500.6.15.3	Akreditasi dan kelembagaan
	500.6.15.4	Kerja sama dan harmonisasi
500.6.16	Pengembangan Usaha dan Investasi	
	500.6.16.1	Kemitraan dan kewirausahaan
	500.6.16.2	Investasi
	500.6.16.3	Promosi dalam negeri
	500.6.16.4	Promosi luar negeri
500.6.17	Pemasaran Domestik	
	500.6.17.1	Informasi pasar
	500.6.17.2	Pemantauan pasar dan stabilisasi harga
	500.6.17.3	Sarana dan kelembagaan pasar
	500.6.17.4	Jaringan pemasaran
500.6.18	Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, TOR/Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat-menyurat	
500.6.19	Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	
	500.6.19.1	Hasil penelitian dan pengembangan
	500.6.19.2	Hasil pengkajian dan kebijakan dan strategi

500.6.20	Diseminasi	
500.6.21	Publikasi Hasil Penelitian/Pengkajian	
	500.6.21.1	Pameran, temu lapang, temu bisnis, demlot, seminar lokakarya, temu karya, *workshop*
	500.6.21.2	Jurnal, buletin, monograf, prosiding, dan pubikasi lainnya
500.6.22	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	
500.6.23	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	
500.6.24	Data Penelitian dan Pengembangan	
500.6.25	Evaluasi Penelitian/Pengkajian dan Pengembangan	
500.6.26	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	
	500.6.26.1	Hak cipta
	500.6.26.2	Hak paten sederhana
	500.6.26.3	Hak paten biasa
	500.6.26.4	Hak merek
	500.6.26.5	Pendaftaran varietas tanaman
	500.6.26.6	Permohonan hak PVTT tanaman semusim dan tahunan
	500.6.26.7	Permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang ditolak
500.6.27	Pelayanan Perizinan Pertanian	
	500.6.27.1	Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)
	500.6.27.2	Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)
	500.6.27.3	Sarana III (bidang bibit, karkas, daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)

500.6.28 Pelayanan Hukum
- 500.6.28.1 Sertifikasi
- 500.6.28.2 Pertimbangan hukum

500.6.29 Karantina Pertanian
- 500.6.29.1 Karantina tumbuhan
- 500.6.29.2 Karantina hewan

500.6.30 Bimbingan Teknis

500.6.31 Evaluasi

500.7 PETERNAKAN

500.7.1 Kebijakan di Bidang Peternakan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.7.2 Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 500.7.2.1 Perbibitan ternak, antara lain: produksi bibit ternak ruminansia, produksi bibit ternak nonruminansia, penilaian dan pelepasan bibit ternak, pengembangan bibit ternak, surat rekomendasi dan persetujuan pemasukan/ pengeluaran
- 500.7.2.2 Pakan ternak
- 500.7.2.3 Budidaya ternak
- 500.7.2.4 Kesehatan hewan, antara lain: pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, pengawasan obat hewan
- 500.7.2.5 Kesehatan masyarakat veteriner dan pascapanen, antara lain: pascapanen, higien sanitasi, pengawasan *sanitary* dan keamanan produk hewan, zoonosis dan kesejahteraan hewan, pengujian dan sertifikasi produk hewan, surat rekomendasi dan persetjuan pemasukan/pengeluaran

500.7.3 Bimbingan Teknis

500.7.4 Evaluasi

500.8 PERKEBUNAN

500.8.1 Kebijakan di Bidang Perkebunan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.8.2 Tanaman Semusim

500.8.2.1 Identifikasi dan pendayagunaan sumber daya tanaman semusim

500.8.2.2 Perbenihan tanaman semusim

500.8.2.3 Budidaya teknologi budidaya tanaman semusim

500.8.2.4 Pemberdayaan tanaman semusim

500.8.3 Tanaman Rempah dan Penyegar

500.8.3.1 Identifikasi dan pendayagunaan sumber daya tanaman rempah dan penyegar

500.8.3.2 Perbenihan tanaman rempah dan penyegar

500.8.3.3 Budidaya tanaman rempah dan penyegar

500.8.3.4 Pemberdayaan dan kelembagaan tanaman rempah dan penyegar

500.8.4 Tanaman Tahunan

500.8.4.1 Identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, tanaman tahunan

500.8.4.2 Perbenihan tanaman tahunan

500.8.4.3 Budidaya tanaman tahunan

500.8.4.4 Pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan

500.8.5 Perlindungan Perkebunan

500.8.5.1 Identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim, perlindungan perkebunan

500.8.5.2 Identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman rempah dan penyegar

500.8.5.3 Identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman tahunan

500.8.5.4 Dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran

500.8.6 Pascapanen dan Pembinaan Usaha

500.8.6.1 Pascapanen tanaman semusim, rempah dan penyegar

500.8.6.2 Pascapanen tanaman tahunan

500.8.6.3 Bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan

500.8.6.4 Gangguan usaha dan penanganan konflik

500.8.7 Bimbingan Teknis Perkebunan

500.8.8 Evaluasi Perkebunan

500.9 PERINDUSTRIAN

500.9.1 Kebijakan di Bidang Perindustrian yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.9.2 Iklim Usaha dan Kerja Sama

500.9.2.1 Industri manufaktur

500.9.2.2 Industri agro

500.9.2.3 Industri unggulan berbasis teknologi tinggi

500.9.2.4 Industri kecil dan menengah

500.9.3 Promosi Industri

500.9.3.1 Industri manufaktur

500.9.3.2 Promosi industri agro

500.9.3.3 Industri unggulan berbasis teknologi tinggi

500.9.3.4 Industri kecil dan menengah

500.9.4 Standardisasi dan Teknologi

500.9.4.1 Industri manufaktur

500.9.4.2 Industri agro

500.9.4.3 Industri unggulan berbasis teknologi tinggi

500.9.4.4 Industri kecil dan menengah

500.9.5	Hak dan Kekayaan Intelektual	
	500.9.5.1	Industri manufaktur
	500.9.5.2	Industri agro
	500.9.5.3	Industri unggulan berbasis teknologi tinggi
	500.9.5.4	Industri kecil dan menengah
500.9.6	Industri Hijau	
	500.9.6.1	Industri manufaktur
	500.9.6.2	Industri agro
	500.9.6.3	Industri unggulan berbasis teknologi tinggi
	500.9.6.4	Industri kecil dan menengah
500.9.7	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota	
500.9.8	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	
500.9.9	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri	
500.9.10	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri	
500.9.11	Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional	
500.9.12	Standardisasi	
	500.9.12.1	Standar
	500.9.12.2	Penyiapan penerapan
	500.9.12.3	Infrastruktur standar
500.9.13	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri	
	500.9.13.1	Kebijakan industri
	500.9.13.2	Perpajakan dan tarif
	500.9.13.3	Pengembangan model industrial
500.9.14	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup	
	500.9.14.1	Industri hijau
	500.9.14.2	Lingkungan hidup
	500.9.14.3	Energi
500.9.15	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	
	500.9.15.1	Pengkajian dan penerapan kebijakan teknologi industri

500.9.15.2 Pengkajian dan penerapan inovasi teknologi industri

500.9.15.3 Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

500.9.16 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri

500.10 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

500.10.1 Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.10.2 Rekomendasi Kegeologian

500.10.2.1 Mitigasi gunung api, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah

500.10.2.2 Air tanah dan geologi tata lingkungan

500.10.2.3 Pertambangan

500.10.2.4 Panas bumi

500.10.2.5 Geosains

500.10.2.6 Pengukuran *Time Domain Electromagnetic* (TDEM)

500.10.2.7 Kelayakan lingkungan

500.10.3 Penelitian Kegeologian

500.10.3.1 Administrasi pelaksanaan penelitian

500.10.3.2 Administrasi tenaga penelitian

500.10.3.3 Administrasi penggunaan peralatan penelitian

500.10.3.4 *Log-book* peralatan survei/ peralatan uji/kalibrasi

500.10.3.5 Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian

500.10.3.6 Sumber daya geologi

500.10.3.7 Air tanah dan geologi tata lingkungan

500.10.3.8 Vulkanologi dan mitigasi bencana geologi

500.10.3.9 Survei geologi

500.10.4	Inventarisasi dan Evaluasi Kegeologian	
	500.10.4.1	Sumber daya geologi
	500.10.4.2	Vulkanologi dan mitigasi bencana geologi
	500.10.4.3	Air tanah dan geologi tata lingkungan
	500.10.4.4	Survei geologi
	500.10.4.5	Konservasi
500.10.5	Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi	
	500.10.5.1	Peta potensi dan sebaran
	500.10.5.2	Air tanah dan geologi tata lingkungan
	500.10.5.3	Mitigasi bencana gunung api, gerakan tanah, gempa bumi dan tsunami, semburan lumpur/gas serta kebakaran batu bara
	500.10.5.4	Survei geologi
500.10.6	Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.6.1	Rencana induk jaringan gas bumi
	500.10.6.2	Rencana dan realisasi investasi
	500.10.6.3	Penetapan harga minyak mentah
	500.10.6.4	Penetapan bagi hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) minyak dan gas bumi
	500.10.6.5	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
	500.10.6.6	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	500.10.6.7	Rekomendasi kemampuan produksi barang dan jasa dalam negeri
	500.10.6.8	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)

500.10.7	Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.7.1	Penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas bumi (konvensional dan nonkonvensional)
	500.10.7.2	Eksplorasi minyak dan gas bumi (antara lain: pemanfaatan data migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, izin pengiriman data ke luar negeri, izin pengiriman data ke luar negeri, unitisasi lapangan minyak dan gas bumi, rekomendasi pengalihan interest, rekomendasi penyisihan wilayah kerja minyak dan gas bumi, penyiapan dokumen pengakhiran kontrak, laporan data survei seismik, laporan data pemboran sumur eksplorasi per semester, laporan data pemboran sumur eksplorasi tahunan)
	500.10.7.3	Eksploitasi minyak dan gas bumi (antara lain: rekomendasi penggunaan data eksploitasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, *reprocessing*), penetapan pengusahaan minyak bumi dari sumur tua, penetapan pengusahaan lapangan produksi yang dikembalikan kepada pemerintah, buku cadangan minyak dan gas bumi, data cadangan strategis/penyangga minyak dan gas bumi, laporan hasil pemantauan data produksi minyak dan gas bumi, laporan hasil inventarisasi mutu minyak dan gas bumi)

	500.10.7.4	Pengembangan lapangan minyak dan gas bumi (POD)
	500.10.7.5	Perpanjangan kontrak KKS
	500.10.7.6	Penetapan alokasi dan harga gas
	500.10.7.7	Partisipasi interest
	500.10.7.8	Tumpang tindih lahan
500.10.8	Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.8.1	Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga minyak bumi dan gas bumi, hasil olahan dan bahan bakar lain, antara lain: pedoman dan prosedur, layanan usaha (izin/rekomendasi/ penandasahan), pengawasan
	500.10.8.2	Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran
	500.10.8.3	Penetapan harga dan subsidi bahan bakar yang ditetapkan dengan keputusan menteri
500.10.9	Teknik dan Lingkungan	
	500.10.9.1	Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI)/Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
	500.10.9.2	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), antara lain: berkas permohonan, berita acara hasil evaluasi, salinan sertifikat NPT, register NPT
	500.10.9.3	Buku register *Welding Procedure Specification* (WPS)/*Procedure Qualification Record* (PQR)
	500.10.9.4	Register dan sertifikat kualifikasi juru las

500.10.9.5	Keselamatan hulu minyak dan gas bumi, antara lain: pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan, pemeriksaan kalibrasi teknis, pengawasan keselamatan operasi
500.10.9.6	Keselamatan hilir minyak dan gas bumi, antara lain: pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan, pemeriksaan kalibrasi teknis, pengawasan keselamatan operasi
500.10.9.7	Keselamatan kerja dan lindungan lingkungan
500.10.9.8	Dokumen persetujuan penunjukkan kepala/wakil kepala teknik tambang hulu dan hilir, antara lain: dokumen permohonan pengajuan persetujuan penunjukkan calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, surat undangan presentasi, makalah presentasi, surat persetujuan/pengesahan penunjukan kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi
500.10.9.9	Penghargaan keselamatan kerja, antara lain: urat permohonan mendapatkan penghargaan, surat penugasan dalam rangka verifikasi, berkas hasil evaluasi verifikasi, salinan tanda penghargaan, dokumen pengajuan dan penilaian tanda penghargaan keselamatan minyak dan gas bumi
500.10.9.10	Usaha penunjang

500.10.10	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.10.1	Perencanaan program kerja pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi
	500.10.10.2	Pengadaan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi
	500.10.10.3	Pelaksanaan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi
	500.10.10.4	Pengawasan dan evaluasi pembangunan infrastuktur minyak dan gas bumi
500.10.11	Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	
	500.10.11.1	Usulan wilayah kerja panas bumi
	500.10.11.2	Usul program aneka energi pemerintah daerah dan lembaga
	500.10.11.3	Penyiapan program pemanfaatan energi
	500.10.11.4	Proyeksi kebutuhan energi dari EBT
	500.10.11.5	Perencanaan pemanfaatan energi dari EBT
	500.10.11.6	Penyusunan neraca energi
	500.10.11.7	Road map di bidang EBT
500.10.12	Panas Bumi	
	500.10.12.1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
	500.10.12.2	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)
	500.10.12.3	Sertifikasi kelayakan penggunaan peralatan
	500.10.12.4	Rekomendasi bahan peledak
	500.10.12.5	Perizinan penggunaan gudang bahan peledak

	500.10.12.6	Izin tangki bahan bakar cair
	500.10.12.7	Persetujuan sertifikasi *Welding Prosedure Specifikation* (WPS) dan *Prosedure Qualification Record* (PQR) dan kualifikasi juru las *Prosedure* Qualification *Record* (PQR) dan kualifikasi juru las
	500.10.12.8	Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP)
	500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
	500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)
	500.10.12.11	Penetapan kapasitas usaha panas bumi
	500.10.12.12	Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
	500.10.12.13	Pengawasan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi
	500.10.12.14	Pelaksanaan kerja sama panas bumi
	500.10.12.15	Inventarisasi, verifikasi dan evaluasi Obyek Vital Nasional (OBVITNAS) bidang panas bumi
	500.10.12.16	Monitoring pelaksanaan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada kegiatan pengusahaan panas bumi
	500.10.12.17	Pembinaan dan pengawasan investasi panas bumi
500.10.13	Bioenergi	
	500.10.13.1	Penerbitan izin usaha niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)
	500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)

	500.10.13.3	Penerbitan rekomendasi ekspor-impor
	500.10.13.4	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)
	500.10.13.5	Evaluasi/Revisi HIP BBN
	500.10.13.6	Data base pengusahaan bioenergi
	500.10.13.7	Penetapan badan usaha sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik
	500.10.13.8	Penetapan spesifikasi bahan bakar nabati
	500.10.13.9	Usul program bioenergi pemerintah daerah dan lembaga
500.10.14	Aneka Energi	
	500.10.14.1	Penerbitan izin usaha aneka energi
	500.10.14.2	Penetapan kapasitas usaha
	500.10.14.3	Rekomendasi kompetensi dan rencana penggunaan tenaga kerja asing
	500.10.14.4	Rekomendasi persetujuan perubahan pemegang saham
	500.10.14.5	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)
500.10.15	Konservasi Energi	
	500.10.15.1	Audit energi melalui program kemitraan konservasi energi
	500.10.15.2	Monitoring implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi
	500.10.15.3	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajamen energi dipengguna energi di atas 6.000 TOE
	500.10.15.4	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast

	500.10.15.5	Penyusunan daftar peralatan/ teknologi efisiensi
	500.10.15.6	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca
	500.10.15.7	Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi
	500.10.15.8	Profil investasi efisiensi energi
	500.10.15.9	Invesment Grade Audit (IGA)
	500.10.15.10	Bimbingan teknis bidang EBTKE
500.10.16	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE	
	500.10.16.1	Usul pembangunan infrastruktur pemerintah daerah dan lembaga
	500.10.16.2	Perencanaan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi
	500.10.16.3	Pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang EBTKE
	500.10.16.4	Evaluasi program kerja
500.10.17	Bina Program Tenaga Listrik	
	500.10.17.1	Investasi dan pendanaan tenaga listrik, antara lain: dokumen grant/hibah/loan *agreement* luar negeri, monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik
	500.10.17.2	Pengembangan listrik pedesaan, antara lain: data program listrik perdesaan, data Rasio Elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RDB), monitoring dan evaluasi listrik perdesaan, listrik untuk masyarakat tidak mampu
	500.10.17.3	Data dan informasi ketenagalistrikan

500.10.18	Bina Usaha Ketenagalistrikan	
	500.10.18.1	Penyiapan usaha ketenagalistrikan, antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), bimbingan usaha ketenagalistrikan, data laporan berkala pemegang izin
	500.10.18.2	Harga dan subsidi listrik
	500.10.18.3	Hubungan komersial tenaga listrik
	500.10.18.4	Perlindungan konsumen listrik, antara lain: penanganan pengaduan konsumen listrik, dokumen pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, dokumen evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)
500.10.19	Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	
	500.10.19.1	Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan
	500.10.19.2	Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan
	500.10.19.3	Usaha penunjang ketenagalistrikan, antara lain: dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika (IPJ Telematika), dokumen penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)

	500.10.19.4	Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan, antara lain: dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan, laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, dokumen perhitungan faktor emisi *Clean Development Mechansim* (CDM)
500.10.20	Sertifikasi	
	500.10.20.1	Dokumen sertifikasi produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
	500.10.20.2	Dokumen penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)
	500.10.20.3	Dokumen penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) instalasi tenaga listrik
	500.10.20.4	Dokumen pembinaan dan pengawasan Sertifikat Laik Operasi (SLO) instalasi tenaga listrik
	500.10.20.5	Registrasi sertifikasi
500.10.21	Akreditasi Ketenagalistrikan	
500.10.22	Standardisasi Kompetensi	
500.10.23	Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan	
	500.10.23.1	Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.2	Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.3	Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.4	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan

500.10.24	Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan	
	500.10.24.1	Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
	500.10.24.2	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
	500.10.24.3	Dokumen penunjukan Lembaga Inspeksi Teknis (LIT)
	500.10.24.4	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT
	500.10.24.5	Laporan hasil pengawasan penunjukan
500.10.25	Bina Program Mineral dan Batubara	
	500.10.25.1	Penyiapan dan perencanaan program mineral dan batubara
	500.10.25.2	Rencana induk mineral dan batubara
	500.10.25.3	Pengembangan investasi dan kerja sama bidang mineral dan batubara
	500.10.25.4	Data dan informasai mineral dan batubara
	500.10.25.5	Pelaporan program mineral dan batubara
	500.10.25.6	Perencanaan, penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja (WK) mineral dan batubara melalui lelang reguler
	500.10.25.7	Data dan informasi wilayah mineral dan batubara
	500.10.25.8	Perencanaan produksi mineral dan batubara
	500.10.25.9	Pengembangan dan pemanfaatan mineral dan batubara
500.10.26	Pembinaan Pengusahaan Mineral	
	500.10.26.1	Ketenagakerjaan
	500.10.26.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang

	500.10.26.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral
	500.10.26.6	Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)
	500.10.26.7	Perizinan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.8	Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.9	Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
	500.10.26.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral
	500.10.26.12	Teguran kepada pengusahan Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral
	500.10.26.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
	500.10.26.15	Pelaporan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.16	Penghargaan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.17	Penerbitan sertifikat *Clear and Clean* (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral
500.10.27	Pembinaan Pengusahaan Batubara	
	500.10.27.1	Ketenagakerjaan
	500.10.27.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang

500.10.27.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara
500.10.27.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara
500.10.27.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara
500.10.27.6	Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut), antara lain: laporan produksi dan penjualan batubara PKP2B, IUP hingga laporan kontrak penjualan pertambangan batubara
500.10.27.7	Perizinan usaha pertambangan batubara
500.10.27.8	Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
500.10.27.9	Pengelolaan barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B), antara lain: persetujuan pengadaan barang modal (Masterlist)
500.10.27.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
500.10.27.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
500.10.27.12	Teguran kepada pengusahan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
500.10.27.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara
500.10.27.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir

	500.10.27.15	Pelaporan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.16	Penghargaan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.17	Penerbitan sertifikat *Clear and Clean* (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara
500.10.28	Penerimaan Negara	
	500.10.28.1	Penerimaan negara bukan pajak
	500.10.28.2	Penetapan bagi hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
	500.10.28.3	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian PNBP
500.10.29	Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	
	500.10.29.1	Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), antara lain: draft rancangan, rancangan standar nasional
	500.10.29.2	Pengawasan standardisasi
	500.10.29.3	Persetujuan penunjukkan kepala/wakil kepala teknik tambang
	500.10.29.4	Pengawasan keselamatan kegiatan dan keselamatan pekerja, antara lain: laporan kecelakaan tambang/statistik hingga laporan hasil pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	500.10.29.5	Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang, antara lain: pemeriksaan dan pengujian instalasi dan peralatan

500.10.29.6	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
500.10.29.7	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
500.10.29.8	Rekomendasi bahan kimia
500.10.29.9	Pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, antara lain: laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga surat penetapan jaminan pasca tambang
500.10.29.10	Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan, antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) pelaksanaan reklamasi
500.10.29.11	Pemberian penghargaan, antara lain: pemberian penghargaan lingkungan pertambangan, pemberian penghargaan keselematan kerja, dokumen pengajuan dan penilaian tanda penghargaan lingkungan pertambangan, dokumen pengajuan dan penilaian tanda penghargaan keselamatan
500.10.29.12	Pengawasan lingkungan pertambangan
500.10.29.13	Usaha jasa mineral dan batubara
500.10.29.14	Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara

	500.10.29.15	Rekomendasi teknis, antara lain: pengajuan rekomendasi teknis, hasil evaluasi
	500.10.29.16	Persetujuan teknis, antara lain: pengajuan persetujuan teknis, hasil evaluasi
	500.10.29.17	Pengawasan teknis
	500.10.29.18	Pengawasan konservasi mineral dan batubara
	500.10.29.19	Peminaan teknik dan lingkungan mineral dan batubara, antara lain: sosialisasi standardisasi, bimbingan teknis
500.10.30	Program Penelitian dan Pengembangan	
	500.10.30.1	Rencana penelitian dan pengembangan
	500.10.30.2	Pengembangan dan inovasi
	500.10.30.3	Dokumen penerapan/ pemanfaatan/pendayagunaan/ replikasi/prototipe hasil penelitian/ pengkajian/pengembangan/inovasi
	500.10.30.4	Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan, dan inovasi
	500.10.30.5	Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.6	Pembinaan penelitian/ pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahunan dan teknologi
	500.10.30.7	Jaringan sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.8	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

	500.10.30.9	*Master proceeding/* jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.10	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
	500.10.30.11	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.12	Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK
	500.10.30.13	Sertifikasi personil peneliti bidang sumber daya mineral
500.10.31	Sarana Litbang	
	500.10.31.1	Administrasi penggunaan peralatan
	500.10.31.2	*Log-book* peralatan survei/ peralatan uji kalibrasi
500.10.32	Afiliasi	
	500.10.32.1	Proyek percontohan
	500.10.32.2	Promosi dan layanan jasa teknologi
	500.10.32.3	Pembinaan penelitian dan pengembangan
	500.10.32.4	Penyajian informasi
500.10.33	Penelitian dan Pengembangan Kegeologian	
	500.10.33.1	Pemetaaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan
	500.10.33.2	Energi kelautan dan kewilayahan penelitian energi dan kewilayahan pantai
	500.10.33.3	Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan
	500.10.33.4	Penelitian sumber daya mineral kelautan

500.10.34 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi
- 500.10.34.1 Teknologi eksplorasi
- 500.10.34.2 Teknologi eksploitasi
- 500.10.34.3 Laboratorium
- 500.10.34.4 *Study*
- 500.10.34.5 Teknologi proses
- 500.10.34.6 Teknologi aplikasi produk
- 500.10.34.7 Teknologi gas

500.10.35 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara
- 500.10.35.1 Teknologi eksploitasi tambang dan pengolahan sumber daya
- 500.10.35.2 Teknologi pengolahan dan pemanfaatan mineral
- 500.10.35.3 Teknologi pemanfaatan batubara

500.10.36 Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan
- 500.10.36.1 Energi baru terbarukan
- 500.10.36.2 Teknologi ketenagalistrikan
- 500.10.36.3 Lingkungan dan konservasi energi
- 500.10.36.4 Penelitian dan pengembangan teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan konservasi energi

500.11 PERHUBUNGAN
- 500.11.1 Kebijakan di Bidang Perhubungan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.11.2 Jaringan Prasarana dan Pelayanan
  - 500.11.2.1 Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang
  - 500.11.2.2 Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C

	500.11.2.3	Penetapan lokasi terminal barang utama
	500.11.2.4	Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal
	500.11.2.5	Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi
	500.11.2.6	Jaringan lintas pada jaringan jalan primer
	500.11.2.7	Penetapan kelas jalan primer
	500.11.2.8	Kualifikasi teknis petugas terminal
	500.11.2.9	Jaringan transportasi jalan sekunder
500.11.3	Pengembangan Transportasi Jalan	
	500.11.3.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
	500.11.3.2	Pengembangan transportasi jalan
500.11.4	Pengujian Kendaraan Bermotor	
	500.11.4.1	Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor
	500.11.4.2	Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor
	500.11.4.3	Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor
	500.11.4.4	Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor
500.11.5	Teknologi Kendaraan Bermotor	
	500.11.5.1	Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
	500.11.5.2	Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor
	500.11.5.3	Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
	500.11.5.4	Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor

500.11.6	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
	500.11.6.1	Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan
	500.11.6.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional
500.11.7	Perlengkapan Jalan	
	500.11.7.1	Pedoman teknis perlengkapan jalan
	500.11.7.2	Penimbangan kendaraan bermotor di jalan
	500.11.7.3	Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor
	500.11.7.4	Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor
	500.11.7.5	Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional
500.11.8	Angkutan Penumpang	
	500.11.8.1	Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi
	500.11.8.2	Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara
	500.11.8.3	Izin trayek antar kota antar provinsi
	500.11.8.4	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara dan antar kota/provinsi
	500.11.8.5	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum
	500.11.8.6	Pemberian subsidi angkutan umum
	500.11.8.7	Angkutan perintis
	500.11.8.8	Penghargaan perusahaan angkutan umum

500.11.9	Angkutan Barang	
	500.11.9.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
	500.11.9.2	Tarif angkutan barang
	500.11.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu
	500.11.9.4	Pembinaan angkutan barang
	500.11.9.5	Izin dispensasi angkutan jalan
500.11.10	Monitoring Operasional	
	500.11.10.1	Pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan
	500.11.10.2	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan
	500.11.10.3	Berkas pelanggaran Perda
500.11.11	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
	500.11.11.1	Pedoman teknis
	500.11.11.2	Penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	500.11.11.3	Bimbingan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	500.11.11.4	Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil
500.11.12	Analisa dan Evaluasi Jaringan-jaringan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	
	500.11.12.1	Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan
	500.11.12.2	Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan

500.11.13 Pengembangan Jaringan-jaringan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan

500.11.13.1 Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan (peta jaringan, *blueprint* jaringan)

500.11.13.2 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan

500.11.14 Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

500.11.15 Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

500.11.15.1 Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau, dan penyeberangan

500.11.15.2 Pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan

500.11.16 Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

500.11.16.1 Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan

500.11.16.2 Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan

500.11.16.3 Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional

500.11.16.4 Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan

500.11.17 Kualifikasi Teknis Petugas Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

500.11.18 Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau, dan Penyeberangan

500.11.18.1 Manajemen lalu lintas

500.11.18.2 Tata cara berlalu lintas di sungai, danau, dan penyeberangan

500.11.18.3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau

500.11.18.4 Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau

500.11.19 Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau, dan Penyeberangan

500.11.19.1 Pengerukan alur pelayaran sungai, danau, dan kolam pelabuhan penyeberangan

500.11.19.2 Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau

500.11.19.3 Perambuan sungai, danau, dan penyeberangan

500.11.20 Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.20.1 Penyelenggaraan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan

500.11.20.2 Persetujuan operasi kapal Penyeberangan di lintas nasional dan internasional

500.11.21 Tarif dan Keperintisan

500.11.21.1 Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan

500.11.21.2 Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan

500.11.22 Bina Sistem Transportasi Perkotaan

500.11.22.1 Jaringan transportasi perkotaan

	500.11.22.2	Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
	500.11.22.3	Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
500.11.23	Lalu Lintas Perkotaan	
	500.11.23.1	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
	500.11.23.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
	500.11.23.3	Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah
500.11.24	Angkutan Perkotaan	
	500.11.24.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
	500.11.24.2	Jaringan trayek perkotaan
	500.11.24.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
500.11.25	Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan	
	500.11.25.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang
	500.11.25.2	Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi

	500.11.25.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
500.11.26	Dampak Transportasi Perkotaan	
	500.11.26.1	Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan
	500.11.26.2	Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan
	500.11.26.3	*Masterplan* pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan
	500.11.26.4	Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota
	500.11.26.5	Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
	500.11.26.6	*Masterplan* transportasi perkotaan
500.11.27	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan	
	500.11.27.1	Monitoring dan evaluasi data kecelakaan
	500.11.27.2	Kualifikasi unit pengkajian
	500.11.27.3	Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
500.11.28	Pengembangan Keselamatan	
	500.11.28.1	Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
	500.11.28.2	Harmonisasi kebijakan

500.11.29	Promosi dan Kemitraan Keselamatan	
	500.11.29.1	Promosi keselamatan: penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
	500.11.29.2	Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
500.11.30	Bina Keselamatan Angkutan Umum	
	500.11.30.1	Keselamatan pengusahaan angkutan umum
	500.11.30.2	Keselamatan awak angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau
500.11.31	Audit Keselamatan	
	500.11.31.1	Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia
	500.11.31.2	Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau, dan penyeberangan
	500.11.31.3	Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
500.11.32	Inspeksi Keselamatan	
	500.11.32.1	Pedoman keselamatan
	500.11.32.2	Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau, dan penyeberangan
	500.11.32.3	Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan

500.11.33	Parkir	
	500.11.33.1	Surat tugas juru parkir
	500.11.33.2	Izin tempat khusus parkir swasta
	500.11.33.3	Surat tugas TKP pemerintah
500.12	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
500.12.1	Kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.12.2	Telekomunikasi	
	500.12.2.1	Layanan jaringan telekomunikasi
	500.12.2.2	Layanan jasa telekomunikasi
	500.12.2.3	Penomoran telekomunikasi dan informatika
	500.12.2.4	Kelayakan sistem telekomunikasi
500.12.3	Penyiaran	
	500.12.3.1	Pemetaan penyelenggaraan radio dan televisi
	500.12.3.2	Data base penyelenggaraan radio dan televisi
500.12.4	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal	
	500.12.4.1	Telekomunikasi khusus pemerintah daerah
	500.12.4.2	Telekomunikasi khusus nonpemerintah daerah
	500.12.4.3	Layanan khusus penyiaran
	500.12.4.4	Pelayanan kewajiban universal
	500.12.4.5	Pengembangan infrastruktur
500.12.5	Pengendalian Informatika	
	500.12.5.1	Monitoring dan evaluasi jaringan telekomunikasi
	500.12.5.2	Monitoring dan evaluasi jasa telekomunikasi
	500.12.5.3	Monitoring dan evaluasi penyiaran
	500.12.5.4	Pencegahan dan penertiban

500.12.6	*e-Government*	
	500.12.6.1	Tata kelola *e-government*
	500.12.6.2	Teknologi dan infrastruktur *e-government*
	500.12.6.3	Interoperabilitas dan interkonektivitas *e-government*
	500.12.6.4	Aplikasi layanan kepemerintahan
	500.12.6.5	Aplikasi layanan publik
500.12.7	*e- Business*	
	500.12.7.1	Tata kelola *e-business*
	500.12.7.2	Teknologi dan infrastruktur *e-business*
	500.12.7.3	Interoperabilitas dan interkonektivitas *e-business*
	500.12.7.4	Aplikasi layanan *e-busniness*
500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat	
	500.12.8.1	Pemberdayaan informatika masyarakat perkotaan
	500.12.8.2	Pemberdayaan informatika masyarakat pedesaan
500.12.9	Pemberdayaan Industri Informatika	
	500.12.9.1	Industri infrastruktur dan layanan aplikasi informatika
	500.12.9.2	Industri perangkat informatika pengguna
	500.12.9.3	Industri perangkat lunak
	500.12.9.4	Industri konten multimedia
500.12.10	Keamanan Informasi	
	500.12.10.1	Tata kelola keamanan informasi
	500.12.10.2	Teknologi keamanan informasi
	500.12.10.3	Monitoring, evaluasi, dan tanggap darurat keamanan informasi
	500.12.10.4	Penyidikan dan penindakan
	500.12.10.5	Budaya keamanan informasi

500.12.11	Komunikasi Publik	
	500.12.11.1	Tata kelola komunikasi publik
	500.12.11.2	Pengelolaan opini publik
	500.12.11.3	Layanan komunikasi publik
500.12.12	Pengolahan dan Penyediaan Informasi	
	500.12.12.1	Informasi politik, hukum, dan keamanan
	500.12.12.2	Informasi perekonomian
	500.12.12.3	Informasi kesejahteraan rakyat
500.12.13	Pengelolaan Media Publik	
	500.12.13.1	Media cetak
	500.12.13.2	Media *online*
	500.12.13.3	Media luar ruang dan audio visual
500.12.14	Kemitraan Komunikasi	
	500.12.14.1	Kemitraan pemerintah dan lembaga negara
	500.12.14.2	Kemitraan media dan dunia usaha
	500.12.14.3	Kemitraan organisasi kemasyarakatan dan profesi
500.12.15	Infrastruktur Informatika	
	500.12.15.1	Jaringan
	500.12.15.2	Piranti teknologi informatika
	500.12.15.3	Keamanan informatika
500.12.16	Sistem dan Data	
	500.12.16.1	Portal dan konten
	500.12.16.2	Pengumpulan dan pengolahan data
	500.12.16.3	Pengembangan aplikasi
500.12.17	Pusat Kerja Sama	
	500.12.17.1	Kerja sama daerah
	500.12.17.2	Kerja sama bilateral
500.12.18	Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat	
	500.12.18.1	Pelayanan informasi
	500.12.18.2	Hubungan masyarakat
	500.12.18.3	Bimbingan teknis
500.12.19	Evaluasi	

500.13	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
	500.13.1	Kebijakan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.13.2	Pengembangan Destinasi wisata
		500.13.2.1 Perancangan destinasi dan investasi pariwisata
		500.13.2.2 Pengembangan daya tarik wisata
		500.13.2.3 Industri pariwisata
		500.13.2.4 Pemberdayaan masyarakat destinasi pariwisata
		500.13.2.5 Pengembangan wisata minat khusus, konvensi, insentif, dan *event*
	500.13.3	Pemasaran Pariwisata
		500.13.3.1 Pengembangan pasar dan informasi pariwisata
		500.13.3.2 Promosi pariwisata luar negeri
		500.13.3.3 Promosi pariwisata dalam negeri
		500.13.3.4 Pencitraan Indonesia
	500.13.4	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
		500.13.4.1 Pengembangan industri perfilman
		500.13.4.2 Pengembangan seni pertunjukan dan industri musik
		500.13.4.3 Pengembangan seni rupa
	500.13.5	Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK
		500.13.5.1 Pengembangan ekonomi kreatif berbasis media
		500.13.5.2 Desain dan arsitektur
		500.13.5.3 Kerja sama dan fasilitasi
	500.13.6	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		500.13.6.1 Penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan
		500.13.6.2 Penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif

500.13.6.3 Pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan dan ekonomi kreatif

500.13.6.4 Kompetensi kepariwisataan dan ekonomi kreatif

500.14 STATISTIK

500.14.1 Kebijakan di Bidang Statistik yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.14.2 Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi

500.14.2.1 Perencanaan

500.14.2.2 Persiapan, antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, penyusunan kuesioner, penyusunan konsep dan definisi, penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, penyusunan pedoman sosialisasi, sosialisasi kegiatan kepada *stakeholder* dan sumber data (*leaflet*, poster, pertemuan), pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), pelaksanaan pelatihan petugas, penyusunan program pengolahan (*rule* validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), pelatihan petugas pengolahan, perancangan tabel, pelaksanaan uji coba

	500.14.2.3	Pelaksanaan lapangan
	500.14.2.4	Pengolahan, antara lain: pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokkan/*batching*), pemeriksaan dokumen dan pengkodean (*editing/coding*), perekaman data (entri, *scanner*), tabulasi data, pemeriksaan tabulasi, laporan konsistensi tabulasi
	500.14.2.5	Analisis dan penyajian hasil sensus
	500.14.2.6	Diseminasi hasil sensus
500.14.3	Survei	
	500.14.3.1	Perencanaan
	500.14.3.2	Persiapan
	500.14.3.3	Pelaksanaan lapangan, antara lain: pelaksanaan listing, pemilihan sampel, pengumpulan data, pemeriksaan, pengawasan lapangan, monitoring kualitas
	500.14.3.4	Pengolahan, antara lain: pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokkan/*batching*), pemeriksaan dokumen dan pengkodean (*editing/coding*), perekaman data (entri, *scanner*), tabulasi data, pemeriksaan tabulasi, laporan konsistensi tabulasi
	500.14.3.5	Analisis dan penyajian hasil survei, antara lain: pembahasan angka hasil pengolahan, penyusunan
	500.14.3.6	Diseminasi hasil survei

500.14.4 Konsolidasi Data Statistik
- 500.14.4.1 Kompilasi data
- 500.14.4.2 Analisis data
- 500.14.4.3 Penyusunan publikasi

500.14.5 Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik

500.15 KETENAGAKERJAAN

500.15.1 Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.15.2 Perencanaan Tenaga Kerja
- 500.15.2.1 Perencanaan tenaga kerja perusahaan pemerintah
- 500.15.2.2 Perencanaan tenaga kerja perusahaan swasta

500.15.3 Pengembangan Standardisasi Kompetensi
- 500.15.3.1 Penerapan standar kompetensi
- 500.15.3.2 Pengembangan standardisasi kompetensi
- 500.15.3.3 Pengembangan program pelatihan ketenagakerjaan
- 500.15.3.4 Pengembangan program pelatihan produktivitas dan kewirausahaan
- 500.15.3.5 Pengembangan program pelatihan ketransmigrasian

500.15.4 Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja
- 500.15.4.1 Akreditasi dan sistem informasi kelembagaan
- 500.15.4.2 Pengembangan sarana dan fasilitas lembaga pelatihan
- 500.15.4.3 Pengembangan Standar Mutu (PSM) lembaga pelatihan
- 500.15.4.4 Sistem pendanaan dan kerja sama antar lembaga

500.15.5 Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
- 500.15.5.1 Instruktur dan Pengembangan Standar Mutu (PSM) lembaga pelatihan pemerintah

	500.15.5.2	Instruktur lembaga pelatihan swasta
	500.15.5.3	Tenaga pelatihan
	500.15.5.4	Sistem informasi instruktur, Pengembangan Standar Mutu (PSM), dan tenaga pelatihan
500.15.6	Bina Pemagangan	
	500.15.6.1	Pemagangan dalam negeri
	500.15.6.2	Pemagangan luar negeri
	500.15.6.3	Perizinan dan advokasi pemagangan
	500.15.6.4	Promosi dan jenjang pemagangan
500.15.7	Produktivitas dan Kewirausahaan	
	500.15.7.1	Pengembangan promosi dan kerja sama produktivitas dan kewirausahaan
	500.15.7.2	Pengembangan sistem dan peningkatan produktivitas
	500.15.7.3	Pengembangan pengukuran dan kajian produktivitas
	500.15.7.4	Pengembangan kewirausahaan
500.15.8	Pengembangan Pasar Kerja	
	500.15.8.1	Informasi pasar kerja
	500.15.8.2	Analisis pasar kerja
	500.15.8.3	Bursa kerja
	500.15.8.4	Analisis jabatan
500.15.9	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
	500.15.9.1	Antar kerja
	500.15.9.2	Penempatan tenaga kerja khusus
	500.15.9.3	Penyuluhan dan bimbingan jabatan
	500.15.9.4	Pemberdayaan pengantar kerja
500.15.10	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal	
	500.15.10.1	Tenaga kerja mandiri dan sektoral informal

	500.15.10.2	Pengembangan padat karya
	500.15.10.3	Terapan teknologi tepat guna
	500.15.10.4	Pemberdayaan pendampingan dan kerja sama antar lembaga
500.15.11	Standardisasi Profesi	
	500.15.11.1	Sistem informasi dan registrasi
	500.15.11.2	Pembakuan akreditasi
500.15.12	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi	
	500.15.12.1	Peraturan perusahaan dan perjanjian kerja sama bersama
	500.15.12.2	Perjanjian kerja
	500.15.12.3	Kesejahteraan pekerja
	500.15.12.4	Analisis diskriminasi syarat kerja
500.15.13	Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial	
	500.15.13.1	Organisasi pekerja dan pengusaha
	500.15.13.2	Kelembagaan hubungan industrial
	500.15.13.3	Pemasyarakatan hubungan industrial
500.15.14	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	
	500.15.14.1	Pengupahan
	500.15.14.2	Jaminan sosial tenaga kerja dalam hubungan kerja
500.15.15	Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial	
	500.15.15.1	Pencegahan perselisihan hubungan industrial
	500.15.15.2	Penyelenggaraan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
	500.15.15.3	Pemberdayaan kelembagaan dan tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial

500.15.16	Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
	500.15.16.1	Pengawasan norma kerja
	500.15.16.2	Pengawasan norma hubungan kerja dan perlindungan berserikat
	500.15.16.3	Pengawasan norma penempatan dan latihan tenaga kerja
500.15.17	Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak	
	500.15.17.1	Pengawasan norma kerja perempuan
	500.15.17.2	Pengawasan norma kerja anak
	500.15.17.3	Kerja sama lintas sektoral
	500.15.17.4	Advokasi tenaga kerja perempuan dan anak
500.15.18	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
	500.15.18.1	Pengawasan norma mekanik, pesawat uap dan bejana tekan
	500.15.18.2	Pengawasan norma konstruksi bangunan, listrik dan penanggulangan kebakaran
	500.15.18.3	Pengawasan norma kesehatan kerja
	500.15.18.4	Pengawasan norma lingkungan kerja dan bahan berbahaya
	500.15.18.5	Pengawasan norma kelembagaan, keahlian dan sistem manajemen K3
500.15.19	Laporan Hasil Pengawasan Ketenagaakerjaan	
500.15.20	Bina Penegakan Hukum	
	500.15.20.1	Pemeriksaan norma ketenagakerjaan
	500.15.20.2	Penyidikan norma ketenagakerjaan
	500.15.20.3	Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	500.15.20.4	Kerja sama penegakan hukum

500.15.21 Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

500.15.21.1 Analisis dan standardisasi bidang K3

500.15.21.2 Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K3

500.15.21.3 Bimbingan teknis dan evaluasi pengkajian K3

500.15.21.4 Bimbingan teknis dan evaluasi pelayanan K3

500.15.22 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

500.15.22.1 Program, analisis dan standardisasi pengembangan sdm dan kompetensi K3

500.15.22.2 Penyebarluasan informasi pengembangan SDM dan kompetensi K3

500.15.22.3 Kerja sama tingkat nasional bidang pengembangan SDM dan kompetensi K3

500.15.22.4 Kerja sama tingkat regional bidang pengembangan SDM dan kompetensi K3

500.15.22.5 Kerja sama tingkat internasional bidang pengembangan SDM dan kompetensi K3

500.15.22.6 Bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan SDM dan kompetensi K3

500.16 PENANAMAN MODAL

500.16.1 Kebijakan di Bidang Penanaman Modal yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.16.2 Perencanaan Penanaman Modal

500.16.2.1 Perencanaan industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya

	500.16.2.2	Perencanaan industri manufaktur
	500.16.2.3	Perencanaan jasa dan kawasan
	500.16.2.4	Perencanaan infrastruktur
500.16.3	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
	500.16.3.1	Deregulasi penanaman modal
	500.16.3.2	Pengembangan potensi daerah
	500.16.3.3	Pemberdayaan usaha
	500.16.3.4	Pemberdayaan usaha pembinaan dan penyuluhan
	500.16.3.5	Pemberdayaan usaha kemitraan usaha
	500.16.3.6	Pemberdayaan usaha pelayanan usaha
500.16.4	Promosi Penanaman Modal	
	500.16.4.1	Pengembangan promosi
	500.16.4.2	Analisis strategi promosi
	500.16.4.3	Fasilitasi promosi luar negeri
	500.16.4.4	Promosi sektoral
	500.16.4.5	Fasilitasi promosi daerah
	500.16.4.6	Pameran dan sarana promosi
500.16.5	Kerja Sama Penanaman Modal	
	500.16.5.1	Kerja sama bilateral dan mulitilateral
	500.16.5.2	Kerja sama regional
	500.16.5.3	Kerja sama dunia usaha internasional
500.16.6	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
	500.16.6.1	Pemantauan penanaman modal
	500.16.6.2	Data realisasi penanaman modal
	500.16.6.3	Bimbingan sosialisasi ketentuan penanaman modal
	500.16.6.4	Fasilitasi penyelesaian masalah
	500.16.6.5	Pengawasan penanaman modal
	500.16.6.6	Pencabutan/pembatalan perizinan penanaman modal

500.16.7 Pelayanan Penanaman Modal
- 500.16.7.1 Pelayanan aplikasi
- 500.16.7.2 Pelayanan perizinan
- 500.16.7.3 Pelayanan konsultasi perizinan
- 500.16.7.4 Pelayanan nonperizinan
- 500.16.7.5 Pelayanan fasilitas

500.17 PERTANAHAN
- 500.17.1 Kebijakan di Bidang Pertanahan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.17.2 Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan
  - 500.17.2.1 Fasilitasi pengadaan tanah
  - 500.17.2.2 Pembinaan dan pengendalian administrasi pertanahan
  - 500.17.2.3 Data dan informasi pertanahan
  - 500.17.2.4 Advokasi dan pengendalian
- 500.17.3 Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah
  - 500.17.3.1 Penatagunaan tanah
  - 500.17.3.2 Data dan pemetaan tematik
  - 500.17.3.3 Penguatan atas tanah
- 500.17.4 Sengketa Tanah
  - 500.17.4.1 Pengkajian dan penanganan sengketa
  - 500.17.4.2 Advokasi dan pengendalian

500.18 TRANSMIGRASI
- 500.18.1 Kebijakan di Bidang Transmigrasi yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.18.2 Penyediaan Tanah Transmigrasi
  - 500.18.2.1 Fasilitasi pengadaan tanah
  - 500.18.2.2 Pengurusan legalitas tanah
  - 500.18.2.3 Dokumentasi pertanahan
  - 500.18.2.4 Advokasi pertanahan
- 500.18.3 Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi
  - 500.18.3.1 Penyiapan lahan

	500.18.3.2	Penyiapan sarana
	500.18.3.3	Penyiapan prasarana
	500.18.3.4	Evaluasi kelayakan permukiman
500.18.4	Fasilitasi Penempatan Transmigrasi	
	500.18.4.1	Penyiapan calon transmigrasi
	500.18.4.2	Penyiapan perpindahan
	500.18.4.3	Pelaksanaan perpindahan
	500.18.4.4	Penataan dan adaptasi
500.18.5	Partisipasi Masyarakat	
	500.18.5.1	Promosi dan motivasi
	500.18.5.2	Kerja sama kelembagaan
	500.18.5.3	Kerja sama antar daerah
	500.18.5.4	Pelayanan investasi
500.18.6	Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	
	500.18.6.1	Perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan
	500.18.6.2	Bina sistem informasi
	500.18.6.3	Perencanaan pengembangan kawasan
	500.18.6.4	Perencanaan pengembangan masyarakat
	500.18.6.5	Perencanaan pengembangan pusat pertumbuhan
500.18.7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat	
	500.18.7.1	Bantuan pangan dan kesehatan
	500.18.7.2	Fasilitas sosial budaya
	500.18.7.3	Pengembangan kelembagaan
	500.18.7.4	Bina pendampingan masyarakat transmigrasi
500.18.8	Pengembangan Usaha	
	500.18.8.1	Kewirausahaan
	500.18.8.2	Produksi
	500.18.8.3	Pengolahan hasil dan pemasaran
	500.18.8.4	Lembaga ekonomi dan permodalan

500.18.9 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan
- 500.18.9.1 Analisis dan standardisasi sarana dan prasarana
- 500.18.9.2 Pengembangan sarana
- 500.18.9.3 Pengembangan prasarana
- 500.18.9.4 Evaluasi pengembangan sarana dan prasarana

500.18.10 Penyerasian Lingkungan
- 500.18.10.1 Persiapan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
- 500.18.10.2 Adaptasi dan mitigasi lingkungan
- 500.18.10.3 Evaluasi perkembangan permukiman transmigrasi
- 500.18.10.4 Evaluasi perkembangan pusat pertumbuhan

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

600.1 PEKERJAAN UMUM

600.1.1 Kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

600.1.2 Penatagunaan Sumber Daya Air
- 600.1.2.1 Perencanaan wilayah sungai
- 600.1.2.2 Kelembagaan
- 600.1.2.3 Pemanfaatan sumber daya air
- 600.1.2.4 Hidrologi dan lingkungan sumber daya air
- 600.1.2.5 Pengaturan dan pemantauan

600.1.3 Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
- 600.1.3.1 Perencanaan pengelolaan sumber daya air
- 600.1.3.2 Manajemen mutu
- 600.1.3.3 Informasi dan data sumber daya air
- 600.1.3.4 Keterpaduan pemrograman

600.1.4 Pengelolaan Sumber Daya Air
- 600.1.4.1 Pengelolaan sungai dan pantai

	600.1.4.2	Pengelolaan irigasi dan rawa
	600.1.4.3	Pengelolaan bendungan, danau, situ, dan embung
	600.1.4.4	Pengelolaan air tanah dan air baku
600.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	
	600.1.5.1	Operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai
	600.1.5.2	Operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa
	600.1.5.3	Operasi dan pemeliharaan bendungan, danau, situ, dan embung
	600.1.5.4	Operasi dan pemeliharaan air tanah dan air baku
	600.1.5.5	Operasi dan pemeliharaan pengendalian Lumpur Sidoarjo
600.1.6	Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Bencana Lokal Lingkup Nasional)	
	600.1.6.1	Perencanaan pengendalian Lumpur Sidoarjo
	600.1.6.2	Pemrograman pengendalian Lumpur Sidoarjo
	600.1.6.3	Pelaksanaan pengendalian Lumpur Sidoarjo
	600.1.6.4	Pengendalian dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat Lumpur Sidoarjo
	600.1.6.5	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
600.1.7	Pengembangan Jaringan Jalan	
	600.1.7.1	Keterpaduan perencanaan
	600.1.7.2	Sistem jaringan jalan
	600.1.7.3	Lingkungan dan keselamatan jalan
600.1.8	Pembangunan Jalan	
	600.1.8.1	Standar dan pedoman

	600.1.8.2	Manajemen konstruksi
	600.1.8.3	Pengelolaan gedometrik, perkerasan, dan *drainage*
	600.1.8.4	Pengelolaan geoteknik dan manajemen lereng
600.1.9	Preservasi Jalan	
	600.1.9.1	Standar dan pedoman
	600.1.9.2	Perencanaan teknis
	600.1.9.3	Teknik rekonstruksi
	600.1.9.4	Teknik pemeliharaan jalan
600.1.10	Pengelolaan Jembatan	
	600.1.10.1	Standar dan pedoman
	600.1.10.2	Perencanaan teknis
	600.1.10.3	Teknik jembatan
	600.1.10.4	Teknik terowongan dan jembatan khusus
600.1.11	Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah	
	600.1.11.1	Bimbingan teknik jalan daerah
	600.1.11.2	Pengembangan jalan metropolitan dan kota besar
	600.1.11.3	Pembinaan teknik jalan bebas hambatan
600.1.12	Pengaturan Jalan Tol	
	600.1.12.1	Persiapan pengusahaan jalan tol
	600.1.12.2	Pengadaan investasi jalan tol
	600.1.12.3	Teknik pengaturan jalan tol
	600.1.12.4	Pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol
600.1.13	Keterpaduan Infrastruktur Permukiman	
	600.1.13.1	Keterpaduan perencanaan dan kemitraan
	600.1.13.2	Keterpaduan pembiayaan dan pelaksanaan
600.1.14	Pengembangan Kawasan Permukiman	
	600.1.14.1	Perencanaan teknis
	600.1.14.2	Kawasan permukiman perkotaan

600.1.14.3 Kawasan permukiman pedesaan
600.1.14.4 Kawasan permukiman khusus
600.1.14.5 Kelembagaan

600.1.15 Pembinaan Penataan Bangunan
600.1.15.1 Perencanaan teknis
600.1.15.2 Penataan bangunan gedung
600.1.15.3 Pengelolaan rumah negara
600.1.15.4 Penataan bangunan dan lingkungan khusus
600.1.15.5 Kelembagaan

600.1.16 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
600.1.16.1 Perencanaan teknis
600.1.16.2 Sistem penyediaan air minum perkotaan
600.1.16.3 Sistem penyediaan air minum pedesaan
600.1.16.4 Sistem penyediaan air minum khusus
600.1.16.5 Kelembagaan
600.1.16.6 Peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum
600.1.16.7 Pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja

600.1.17 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
600.1.17.1 Perencanaan teknis
600.1.17.2 Pengelolaan air limbah
600.1.17.3 Pengelolaan persampahan
600.1.17.4 Penyehatan lingkungan permukiman khusus
600.1.17.5 Kelembagaan
600.1.17.6 Pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja

600.1.18 Pemantauan dan Evaluasi

600.2 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
600.2.1 Kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

600.2.2	Perencanaan Pembiayaan Perumahan	
	600.2.2.1	Keterpaduan perencanaan
	600.2.2.2	Strategi pembiayaan dan analisa pasar perumahan
	600.2.2.3	Kemitraan
600.2.3	Pola Pembiayaan Perumahan	
	600.2.3.1	Pola pembiayaan perumahan rumah umum
	600.2.3.2	Pola pembiayaan perumahan rumah swadaya dan mikro perumahan
	600.2.3.3	Pola investasi perumahan
600.2.4	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	
	600.2.4.1	Sumber pembiayaan primer
	600.2.4.2	Sumber pembiayaan sekunder
	600.2.4.3	Sumber tabungan perumahan dan pembiayaan lainnya
	600.2.4.4	Sistem pembiayaan perumahan
	600.2.4.5	Pengelolaan dana pembiayaan perumahan
600.2.5	Perencanaan Penyediaan Perumahan	
	600.2.5.1	Keterpaduan perencanaan
	600.2.5.2	Analisa teknik
	600.2.5.3	Rencana pengembangan lingkungan hunian
	600.2.5.4	Kemitraan dan kelembagaan
600.2.6	Penyediaan Rumah Susun	
	600.2.6.1	Perencanaan teknik
	600.2.6.2	Penyediaan
	600.2.6.3	Penghunian, pengalihan, dan pemanfaatan
	600.2.6.4	Pengelolaan
600.2.7	Penyediaan Rumah Khusus	
	600.2.7.1	Perencanaan teknik
	600.2.7.2	Penyediaan dan pengelolaan rumah tapak khusus

	600.2.7.3	Bimbingan teknis dan supervisi
	600.2.7.4	Penyelenggaraan bantuan rumah swadaya
	600.2.7.5	Perencanaan teknik
	600.2.7.6	Fasilitas *backlog* rumah swadaya dan rumah tidak layak huni
	600.2.7.7	Pelaksanaan bantuan simultan
600.2.8	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial	
	600.2.8.1	Perencanaan teknik
	600.2.8.2	Pemberian bantuan rumah umum
	600.2.8.3	Fasilitasi hunian berimbang
	600.2.8.4	Fasilitasi penyediaan lahan perumahan
600.2.9	Investasi Infrastruktur	
	600.2.9.1	Pelaksanaan kebijakan investasi infrastruktur
	600.2.9.2	Sinkronisasi investasi infrastruktur
	600.2.9.3	Fasilitasi dan mitigasi risiko investasi infrastruktur
	600.2.9.4	Pasar infrastruktur
600.2.10	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	
	600.2.10.1	Sistem penyelenggaraan
	600.2.10.2	Kontrak konstruksi
	600.2.10.3	Konstruksi berkelanjutan
	600.2.10.4	Manajemen mutu
600.2.11	Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	
	600.2.11.1	Kelembagaan
	600.2.11.2	Material dan peralatan konstruksi
	600.2.11.3	Teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri
	600.2.11.4	Usaha jasa konstruksi
600.2.12	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	
	600.2.12.1	Standar dan materi kompetensi

	600.2.12.2	Penerapan kompetensi
	600.2.12.3	Pengembangan profesi jasa konstruksi
	600.2.12.4	Pengembangan produktivitas
600.2.13	Peningkatan Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	
	600.2.13.1	Peningkatan kerja sama
	600.2.13.2	Pemberdayaan jasa konstruksi
600.2.14	Peningkatan Jasa Konstruksi	
	600.2.14.1	Koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja
	600.2.14.2	Pelaksanaan pengendalian mutu
600.2.15	Penerapan Teknologi Konstruksi	
	600.2.15.1	Koordinasi, sinkronisasi, dan kerja sama penerapan teknologi konstruksi
	600.2.15.2	Pengembangan materi
	600.2.15.3	Pendayagunaan material dan peralatan konstruksi
600.2.16	Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	
	600.2.16.1	Antar sektor
	600.2.16.2	Antar wilayah
600.2.17	Pengembangan Kawasan Strategis	
	600.2.17.1	Keterpaduan infrastruktur kawasan strategis
	600.2.17.2	Pengembangan infrastruktur antarkawasan strategis
600.2.18	Pengembangan Kawasan Perkotaan	
	600.2.18.1	Pengembangan infrastruktur kawasan metropolitan
	600.2.18.2	Pengembangan infrastruktur kawasan kota besar dan kota baru
	600.2.18.3	Pengembangan infrastruktur kawasan kota kecil dan pedesaan

600.2.18.4 Analisa manfaat dan skema pembiayaan

600.2.18.5 Sinkronisasi program dan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

600.2.19 Pemantauan dan Evaluasi

600.3 TATA RUANG (TATA KOTA)

600.3.1 Kebijakan di Bidang Tata Ruang yang Dilakukan Pemerintahan Daerah

600.3.2 Perencanaan

600.3.2.1 Tata ruang wilayah kabupaten (RT/RW)

600.3.2.2 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

600.3.2.3 Rencana tata ruang strategis kabupaten

600.3.2.4 Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)

600.3.2.5 Rencana pengembangan sistem sarana dan prasarana kabupaten

600.3.2.6 Rencana teknis prasarana kota

600.3.2.7 Rencana teknis rencana peremajaan dan pengembangan kota prasarana kota

600.3.3 Pemanfaatan dan Pengendalian

600.3.3.1 Evaluasi dan pengawasan penata ruang

600.3.3.2 Izin pemanfaatan ruang

600.3.3.3 Pembatalan izin pemanfaatan ruang

600.3.4 Pemetaan

600.3.4.1 Peta dasar

600.3.4.2 Survei pemetaan ruang darat

600.3.4.3 Survei pemetaan ruang air

600.3.4.4 Survei pemetaan ruang udara

600.4 LINGKUNGAN HIDUP

600.4.1 Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

600.4.2 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

600.4.2.1 Inventarisasi, penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan

600.4.2.2 Evaluasi pemanfaatan sumber daya alam

600.4.3 Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor

600.4.3.1 Evaluasi penerapan

600.4.3.2 Perencanaan lingkungan hidup

600.4.4 Ekonomi Lingkungan

600.4.5 Dampak Lingkungan

600.4.5.1 Bimtek dampak lingkungan

600.4.5.2 Penerapan sistem kebijakan dampak lingkungan

600.4.5.3 Evaluasi dan tindak lanjut

600.4.6 Pemantauan dan Pengawasan

600.4.6.1 Manufaktur prasarana dan jasa

600.4.6.2 Pertambangan energi, minyak dan gas

600.4.6.3 Agro industri dan usaha skala kecil

600.4.6.4 Udara sumber bergerak

600.4.7 Evaluasi dan Pengembangan

600.4.7.1 Manufaktur, prasarana, dan jasa

600.4.7.2 Pertambangan energi, minyak dan gas

600.4.7.3 Agro industri dan usaha skala kecil

600.4.7.4 Udara sumber bergerak

600.4.8 Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan

600.4.8.1 Pengembangan

600.4.8.2 Pemanfaatan

	600.4.8.3	Pengelolaan sumber daya genetik
	600.4.8.4	Keamanan hayati
	600.4.8.5	Pengendalian kerusakan lahan
600.4.9	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat	
	600.4.9.1	Kerusakan ekosistem
	600.4.9.2	Rawa
600.4.10	Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer	
	600.4.10.1	Perangkat mitigasi
	600.4.10.2	Inventarisasi emisi gas rumah kaca
	600.4.10.3	Pengendalian bahan perusak ozon
	600.4.10.4	Pengendalian kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan
600.4.11	Adaptasi Perubahan Iklim	
	600.4.11.1	Perangkat adaptasi perubahan iklim antara lain: pengembangan perangkat adaptasi perubahan iklim, pemantauan, dan evaluasi adaptasi perusahaan iklim
	600.4.11.2	Kerentanan perubahan iklim
600.4.12	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	
	600.4.12.1	Registrasi dan notifikasi
	600.4.12.2	Pemantauan bahan berbahaya dan beracun
	600.4.12.3	Evaluasi dan tindak lanjut
600.4.13	Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	
	600.4.13.1	Pengumpulan dan pemanfaatan
	600.4.13.2	Pengangkutan dan pengolahan
	600.4.13.3	Penimbunan dan dumping
	600.4.13.4	Notifikasi dan rekomendasi limbah lintas batas
600.4.14	Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3	
	600.4.14.1	Pemantauan
	600.4.14.2	Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi

600.4.15	Pengelolaan Sampah	
	600.4.15.1	Pembatasan sampah
	600.4.15.2	Daur ulang dan pemanfaatan sampah
	600.4.15.3	Pembentukan dewan Adipura
	600.4.15.4	Penetapan pemenang Adipura
600.4.16	Hukum Administrasi Lingkungan	
	600.4.16.1	Pengelolaan dan pengembangan pengaduan
	600.4.16.2	Penataan hukum administrasi lingkungan
600.4.17	Penyelesaian Sengketa Lingkungan	
	600.4.17.1	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan
	600.4.17.2	Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
600.4.18	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan	
	600.4.18.1	Penyidikan
	600.4.18.2	Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut
	600.4.18.3	Koordinasi pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
600.4.19	Komunikasi Lingkungan	
	600.4.19.1	Pengembangan komunikasi
	600.4.19.2	Publikasi dan kampanye
600.4.20	Penguatan Inisiatif Masyarakat	
	600.4.20.1	Komunitas pendidikan lingkungan
	600.4.20.2	Kearifan lingkungan
600.4.21	Peningkatan Peran Masyarakat	
	600.4.21.1	Masyarakat perkotaan
	600.4.21.2	Masyarakat pedesaan
600.4.22	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan	
	600.4.22.1	Organisasi sosial masyarakat
	600.4.22.2	Organisasi profesi dunia usaha
600.4.23	Data dan Informasi Lingkungan	
	600.4.23.1	Pengelolaan data

	600.4.23.2	Pengelolaan informasi
	600.4.23.3	Pengembangan perangkat lunak
	600.4.23.4	Pengembangan sistem dan layanan jaringan
600.4.24	Kelembagaan Lingkungan	
	600.4.24.1	Kelembagaan dan tata laksana
	600.4.24.2	Fasilitasi standar pelayanan minimal
600.4.25	Standardisasi dan Teknologi	
	600.4.25.1	Standardisasi manajemen dan dan pengujian lingkungan
	600.4.25.2	Standardisasi kompetensi keahlian dan lembaga penyedia jasa lingkungan
	600.4.25.3	Teknologi ramah lingkungan
600.4.26	Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan	
	600.4.26.1	Pemantauan dan kajian kualitas lingkungan
	600.4.26.2	Laboratorium rujukan dan pengujian

700	PENGAWASAN		
	700.1	PENGAWASAN INTERNAL	
		700.1.1	Rencana Pengawasan
			700.1.1.1 Rencana strategis pengawasan
			700.1.1.2 Rencana kerja pengawas tahunan
			700.1.1.3 Rencana kinerja tahunan
			700.1.1.4 Rencana dan penetapan kinerja tahunan
			700.1.1.5 Rakor pengawasan tingkat daerah
		700.1.2	Pelaksanaan Pengawasan
			700.1.2.1 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan Tindak Lanjut (TL)

	700.1.2.2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut
	700.1.2.3	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut
	700.1.2.4	Laporan perkembangan penanganan surat pengaduan masyarakat
	700.1.2.5	Laporan pemutakhiran data tindak lanjut temuan
	700.1.2.6	Laporan perkembangan barang milik negara
	700.1.2.7	Laporan hasil monitoring dan evaluasi
	700.1.2.8	Laporan kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan dan review
	700.1.2.9	*Good Corporate Governance* (GCG)

800	KEPEGAWAIAN		
	800.1	SUMBER DAYA MANUSIA	
		800.1.1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
			800.1.1.1 Perencanaan kebutuhan aparatur sipil negara, antara lain: bahan penyusunan rencana kebutuhan, analisis kebutuhan, pengolahan data kebutuhan
			800.1.1.2 Perencanaan pertimbangan formasi, antara lain: pertimbangan teknis penetapan formasi Aparatur Sipil Negara, pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas

	800.1.1.3	Penetapan kebutuhan aparatur sipil negara
	800.1.1.4	Standardisasi jabatan, antara lain: informasi jabatan, kompetensi jabatan, klasifikasi jabatan
800.1.2	Formasi dan Pengadaan Pegawai	
	800.1.2.1	Formasi Aparatur Sipil Negara, antara lain: usulan formasi, usulan permintaan formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, persetujuan formasi, penetapan formasi, penetapan formasi khusus
	800.1.2.2	Proses rekrutmen/pengadaan Aparatur Sipil Negara, antara lain: proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara, penetapan pengumuman kelulusan Aparatur Sipil Negara
	800.1.2.3	Pengumuman kelulusan Aparatur Sipil Negara
	800.1.2.4	Berkas lamaran yang tidak diterima
	800.1.2.5	Pengangkatan Aparatur Sipil Negara
	800.1.2.6	*Open* biding (seleksi terbuka jabatan)
	800.1.2.7	Pengelolaan sistem rekrutmen Aparatur Sipil Negara
	800.1.2.8	Fasilitasi penyelenggaraan seleksi Aparatur Sipil Negara

800.1.3	Mutasi Pegawai	
	800.1.3.1	Usulan alih status, pindah instansi, pindah wilayah kerja, diperbantukan, dipekerjakan, penugasan sementara, mutasi antar perwakilan, mutasi ke dan dari perwakilan, pemindahan sementara, persetujuan/ pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara
	800.1.3.2	Kenaikan pangkat/golongan/jabatan
	800.1.3.3	Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural/fungsional
	800.1.3.4	Perubahan data dasar/status/ kedudukan hukum pegawai
	800.1.3.5	Peninjauan masa kerja
	800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat)
800.1.4	Pengembangan Karir	
	800.1.4.1	Usulan tugas belajar/izin belajar/pendidikan dan pelatihan /kursus/magang/ujian dinas/ praktek kerja di instansi lain/pertukaran antar Aparatur Sipil Negara dengan pegawai swasta
	800.1.4.2	Penyesuaian ijazah
	800.1.4.3	Penyusunan sistem karier
	800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja
	800.1.4.5	Angka kredit antara lain: pengajuan daftar usul pengajuan angka kredit, penilaian daftar usul pengajuan angka kredit
800.1.5	Kinerja Aparatur Sipil Negara	
	800.1.5.1	Hasil penilaian kinerja dan standar kerja

800.1.5.2 Pengelolaan data base dan analisis sistem informasi kinerja

800.1.5.3 Evaluasi dan pemantauan penilaian kinerja dan standar kinerja

800.1.6 Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun Aparatur Sipil Negara

800.1.6.1 Kode etik pegawai

800.1.6.2 Disiplin

800.1.6.3 Pemberhentian dengan hormat

800.1.6.4 Pemberhentian dengan tidak hormat

800.1.6.5 Pemberhentian sementara

800.1.6.6 Pensiun Aparatur Sipil Negara antara lain: administrasi pensiun Aparatur Sipil Negara, penetapan pensiun Aparatur Sipil Negara, penetapan pertimbangan teknis pensiun Aparatur Sipil Negara, pensiun pejabat negara dan janda/ dudanya

800.1.7 Bantuan Hukum

800.1.8 Status dan Kedudukan Pegawai

800.1.8.1 Status kepegawaian

800.1.8.2 Kedudukan kepegawaian

800.1.8.3 Keberatan pegawai

800.1.8.4 Perselisihan/sengketa kepegawaian

800.1.9 Sistem Informasi Kepegawaian

800.1.9.1 Pengolahan data dan informasi kepegawaian

800.1.9.2 Pengembangan sistem informasi kepegawaian

800.1.9.3 Pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian elektonik

800.1.9.4 Sistem pengelolaan arsip kepegawaian fisik

800.1.10	Pengawasan dan Pengendalian	
	800.1.10.1	Formasi, pengadaan, dan pasca pendidikan dan pelatihan
	800.1.10.2	Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan
	800.1.10.3	Gaji dan tunjangan, kesejahteraan, dan kinerja
	800.1.10.4	Kode etik, disiplin, pemberhentian, dan pensiun Aparatur Sipil Negara
	800.1.10.5	Laporan hasil pengawasan dan pengendalian
	800.1.10.6	Sanggahan terhadap permasalahan tenaga honorer
800.1.11	Administrasi Pegawai	
	800.1.11.1	Surat perintah dinas/surat tugas
	800.1.11.2	Cuti sakit
	800.1.11.3	Cuti bersalin
	800.1.11.4	Cuti tahunan
	800.1.11.5	Cuti alasan penting
	800.1.11.6	Cuti besar
	800.1.11.7	Cuti di luar tanggungan negara
	800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu
	800.1.11.9	Keanggotaan organisasi profesi/ kedinasan
	800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
	800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
	800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
	800.1.11.13	Pengurusan kenaikan gaji berkala, mutasi gaji/ tunjangan
800.1.12	Kesejahteraan Pegawai	
	800.1.12.1	Pemeliharaan kesehatan Pegawai

	800.1.12.2	Asuransi pegawai/BPJS
	800.1.12.3	Tabungan perumahan
	800.1.12.4	Bantuan sosial
	800.1.12.5	Pakaian dinas
	800.1.12.6	Layanan pegawai yang meninggal karena dinas
	800.1.12.7	Pemberian tali kasih
	800.1.12.8	Pemberian piagam penghargaan dan tanda jasa
	800.1.12.9	Olahraga dan rekreasi
	800.1.12.10	Rekam medis
800.1.13	Administrasi Perseorangan	
	800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
	800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
	800.1.13.3	Pejabat negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
	800.1.13.4	Sekretaris Daerah
	800.1.13.5	Aparatur Sipil Negara berjasa/ terlibat dalam peristiwa berskala nasional
800.1.14	Penilaian Kompetensi	
	800.1.14.1	Penilaian kompetensi
	800.1.14.2	Hasil penilaian kompetensi
800.2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
800.2.1	Kebijakan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
800.2.2	Pendidikan dan Pelatihan	
	800.2.2.1	Sistem informasi program dan pembinaan pendidikan dan pelatihan
	800.2.2.2	Pedoman-pedoman pendidikan dan pelatihan
	800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum pendidikan dan pelatihan
	800.2.2.4	Modul-modul pendidikan dan pelatihan

	800.2.2.5	Panduan fasilitator
	800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
	800.2.2.7	Notulen sosialisasi/rapat koordinasi kebijakan pendidikan dan pelatihan
	800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan pendidikan dan pelatihan
	800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi pendidikan dan pelatihan
800.2.3	Widyaiswara	
	800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan Widyaiswara
	800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara
	800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
	800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara
	800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
	800.2.3.6	Sistem informasi pembinaan Widyaiswara
800.2.4	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
	800.2.4.1	Perencanaan peserta, pengajar, penjadwalan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
	800.2.4.2	Penyelenggaraan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
	800.2.4.3	Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
	800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
	800.2.4.5	Sistem informasi pendidikan dan pelatihan

		800.2.4.6	Monitoring penyelenggara pendidikan dan pelatihan
		800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan
	800.2.5	Alumni	
900	KEUANGAN		
	900.1	KEUANGAN DAERAH	
		900.1.1	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)
			900.1.1.1 Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
			900.1.1.2 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)
			900.1.1.3 Penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada dewan perwakilan
			900.1.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)
		900.1.2	Penyusunan Anggaran
			900.1.2.1 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan
			900.1.2.2 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota
			900.1.2.3 Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah
			900.1.2.4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

900.1.3	Pelaksanaan Anggaran	
	900.1.3.1	Surat penyedia dana (SPP, SPM, dan SP2D) UP, GU, TU, dan LS
	900.1.3.2	Pendapatan
	900.1.3.3	Belanja
	900.1.3.4	Pembiayaan daerah
	900.1.3.5	Dokumen penatausahaan keuangan
	900.1.3.6	Pertanggungjawaban penggunaan dana
	900.1.3.7	Daftar gaji
	900.1.3.8	Kartu gaji
	900.1.3.9	Data rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
	900.1.3.10	Laporan keuangan
900.1.4	Pinjaman/Hibah Luar Negeri	
	900.1.4.1	Permohonan pinjaman/hibah luar negeri (*blue book*)
	900.1.4.2	Dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai (*green book*)
	900.1.4.3	Dokumen *Memorandum of Understanding* (MoU) dan dokumen sejenisnya
	900.1.4.4	Dokumen *loan agremeent* (PHLN) antara lain: draft *agreement, legal opinion*, surat menyurat dengan Lender
	900.1.4.5	Alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri, antara lain: usulan luncuran dana
	900.1.4.6	Aplikasi penarikan dana BLN berikut lampirannya
	900.1.4.7	Dokumen otorisasi penarikan dana (*payment advice*)

900.1.4.8 Dokumen realisasi pencairan dana bantuan luar negeri, yaitu surat perintah pencairan dana, SPM beserta lampirannya antara lain: SPP, kontrak, BA, dan data pendukung lainnya

900.1.4.9 *Replenishment* (permintaan penarikan dana dari negara donor) meliputi antara lain: *No Objection Letter* (NOL), *project implementation, notification of contract, Withdrawal Authorization* (WA)

900.1.4.10 *Staff appraisal report*

900.1.4.11 *Report*/laporan

900.1.4.12 Laporan hutang daerah

900.1.4.13 *Completion report/annual report*

900.1.4.14 Ketentuan/peraturan yang menyangkut pinjaman/hibah luar negeri

900.1.5 Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)

900.1.6 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

900.1.6.1 Manual implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

900.1.6.2 Dokumen kebijakan akuntansi

900.1.6.3 Arsip data komputer dan berita acara rekonsiliasi

900.1.6.4 Laporan realisasi anggaran dan neraca bulanan/triwulanan/ semesteran

900.1.7 Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan

900.1.7.1 Surat penetapan pemimpin proyek/bagian proyek, bendahara, atas penggunaan anggaran kegiatan pembantuan, termasuk *specimen* tanda tangan

	900.1.7.2	Berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya: SPP-SPP-daftar perincian penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM nihil, penagihan/*invoice*, faktur pajak, bukti penerimaan kas/bank beserta bukti pendukungnya antara lain: *copy* faktur pajak dan nota kredit bank, permintaan pelayanan jasa/ *service report* dan berita acara penyelesaian pekerjaan
	900.1.7.3	Buku rekening bank
	900.1.7.4	Keputusan pembukuan rekening
	900.1.7.5	Pembukuan anggaran terdiri antara lain: Buku Kas Umum (BKU), buku, pembantu, register dan buku tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/ Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan rekening koran
900.1.8	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan	
	900.1.8.1	Berkas penerimaan keuangan pelaksanaan dan tugas pembantuan termasuk dana sisa atau pengeluaran lainnya
	900.1.8.2	Berkas penerimaan pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPN dan denda keterlambatan menyelesaikan pekerjaan

900.1.9 Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari APBD meliputi: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD

900.1.10 Pelaksanaan Anggaran Pilkada dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu

900.1.10.1 Berkas penetapan bendahara dan atasan langsung bendahara KPUD, bendahara Panwasda dan bendahara pada panitia Pilkada dan Pemilu

900.1.10.2 Berkas penerimaan komisi, rabat pembayaran pengadaan jasa, bunga, pelaksanaan Pilkada/ Pemilu

900.1.10.3 Berkas setor sisa dana Pilkada/ Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro berkas penyaluran biaya Pemilu termasuk diantaranya bukti transfer bank

	900.1.10.4	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk perubahan/ pergeseran/revisinya
900.1.11	Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah	
	900.1.11.1	Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan
	900.1.11.2	Hasil pengawasan dan pemeriksaan internal
	900.1.11.3	Laporan aparat pemeriksa fungsional
	900.1.11.4	Dokumen penyelesaian kerugian daerah
900.1.12	Anggaran Daerah	
	900.1.12.1	Anggaran daerah
	900.1.12.2	Dukungan teknis anggaran daerah
900.1.13	Pendapatan dan Investasi Daerah	
	900.1.13.1	Pajak daerah dan retribusi daerah antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah

900.1.13.2	Badan usaha milik daerah antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga nonkeuangan, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah
900.1.13.3	Badan layanan umum daerah antara lain: analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan keuangan badan layanan umum daerah, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
900.1.13.4	Pengelolaan kekayaan daerah antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah

	900.1.13.5	Pinjam dan obligasi daerah antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah
900.1.14	Fasilitasi Dana Perimbangan	
	900.1.14.1	Fasilitasi dana alokasi umum antara lain: koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum
	900.1.14.2	Fasilitasi dana alokasi khusus antara lain: koordinasi penyiapan data dasar, sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus, penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus

900.1.14.3 Dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam antara lain: koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam

900.1.14.4 Dana otonomi khusus dan dana transfer lainnya antara lain: sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya

900.1.14.5 Dukungan teknis fasilitasi dana perimbangan antara lain: penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan

900.1.15 Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

900.1.15.1 Akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah

900.1.15.2	Pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
900.1.15.3	Pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
900.1.15.4	Kajian kebijakan dan bantuan keterangan ahli antara lain: penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
900.1.15.5	Data informasi dan pengelolaan keuangan daerah antara lain: penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

WALI KOTA SERANG,

SYAFRUDIN